



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA BIRO HMTI 2024

www.ombudsman.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini adalah pemenuhan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas capaian Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada tahun 2024. Seluruh target dan sasaran kinerja telah tercapai dan turut berkontribusi positif kepada pencapaian kinerja Ombudsman Republik Indonesia. Namun peningkatan dan perbaikan tetap diperlukan sehingga kinerja selalu lebih baik dari tahun sebelumnya, baik secara kualitas, kuantitas, efektifitas, dan akuntabilitas.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan berikan penghargaan kepada seluruh pihak internal maupun eksternal dari Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi atas bantuan dan kerjasamanya dalam mendukung dan ikut mengawal pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sepanjang tahun 2024. Seluruh masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja secara terus menerus. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

#

DODI WAHYUGI ST, MMSi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi adalah sebuah unit kerja (eselon II) di dalam Lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok selaku pengelola dan penanggung jawab Pelayanan Informasi dan Kehumasan, Teknologi Informasi, serta Sistem Data dan Informasi (Sisdatin), dan Layanan Kepustakaan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Serta menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan dan layanan hubungan masyarakat; koordinasi pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi; koordinasi pengelolaan data dan layanan kepustakaan; dan pelaksanaan administrasi Biro.

Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah “Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas”. Dalam mencapai hal tersebut diukur melalui indikator Indeks kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dengan target nilai 2,95 (skala 4). Realisasi yang dicapai yaitu 3,56 dengan persentase sebesar 120,68%, diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai atas aspek Implementasi (Bobot 33,33%), hasil: 95,49;
2. Nilai atas aspek Manfaat (Bobot 66,67%), hasil: 85,92.

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah menyusun 6 dokumen yang terdiri dari: Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Triwulan I, II, III, IV dan Laporan Tahunan 2024 sesuai dengan target perjanjian kinerja, dengan output yang dihasilkan antara lain: Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Indeks SPBE, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Nilai SAKIP, Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku, Persentase tindak lanjut temuan BPK, Nilai Pengelolaan Arsip, Rasio Pegawai yang meningkat kinerjanya melalui CMC, dan Persentase tindak lanjut kerja atas temuan aduan dan saran penjaminan mutu. Kinerja Keuangan: dari alokasi anggaran Rp 3.209.175.000 direalisasikan Rp 3.200.018.002 (99,71%), dengan tercapainya semua target di tahun 2024, terdapat sisa anggaram sebesar Rp 9.156.998. *(Realisasi Anggaran Berdasarkan POK Biro HMTI)*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang	3
1.3. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia	3
1.3.1. Struktur Organisasi	5
1.3.2. Sumber Daya Manusia	8
BAB II	10
RENCANA KINERJA	10
1.1. Penetapan Kinerja	10
BAB III.....	13
AKUNTABILITAS KINERJA	13
2.1. Analisis Kinerja.....	13
2.2. Capaian Kinerja.....	13
2.3. Realisasi Anggaran	21
2.4. Keberhasilan Kinerja (Pencapaian).....	25
2.4.1. Kelompok Kerja/Layanan Hubungan Masyarakat	25
2.4.2. Kelompok Kerja/Layanan Data Informasi (Datin dan TI)	36
2.4.3. Kelompok Kerja/Layanan Kepustakaan	44
Penghargaan.....	53
BAB IV	59
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu alat untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja, yang diatur dalam pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu instrumen utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Untuk pelaksanaan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki tiga Kelompok Kerja/Layanan yang saling bersinergi satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mengusung efektifitas dan efisiensi dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya berbentuk anggaran.

Pada umumnya capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kinerja, namun kondisi sosial budaya yang dinamis dan perkembangan teknologi yang semakin maju, menuntut Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi untuk selalu melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja yang terus menerus sehingga dapat beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi di era digital saat ini.

Keberhasilan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang dapat mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan dan cara memecahkan permasalahan tersebut. Permasalahan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dapat dilihat dari aspek-aspek berikut;

- a. Terbatasnya sumber daya (Pegawai, Anggaran, Sarana-Prasarana dan lain-lain) yang tersedia untuk pengembangan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi; dan
- b. Belum tertibnya administrasi dalam lingkup internal sehingga memperlambat proses pelaksanaan kegiatan di Ombudsman RI.

Untuk pelaksanaan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki tiga Kelompok Kerja/Layanan yang saling bersinergi satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mengusung efektifitas dan efisiensi dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya berbentuk anggaran sarana-prasarana, dan lain-lain.

Pada umumnya capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kinerja, namun kondisi sosial budaya yang dinamis dan perkembangan teknologi yang semakin maju, menuntut Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi untuk selalu melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja yang terus menerus sehingga dapat beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi, terutama yang terjadi pada ranah pelayanan publik di era digital saat ini yang sangat dinamis.

1.2.Fungsi, Tugas, Dan Wewenang

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi adalah sebuah unit kerja di dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia pada lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pengawas pelayanan publik di Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diatur dalam pasal 17 dan 18, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mengidentifikasi peran strategis Biro pada lembaga Ombudsman Republik Indonesia, antara lain:

- a. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sebagai salah satu unit di Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan keberhasilan kinerja Ombudsman RI;
- b. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menjadi unit vital dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga dapat memberikan pelayanan dan dukungan optimal terhadap tercapainya keberhasilan kinerja organisasi;
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki peranan penting dalam pelayanan publik khususnya terkait implementasi keterbukaan informasi publik;
- d. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menjadi penyedia dukungan teknologi informasi bagi unit-unit kerja di Ombudsman RI;
- e. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menjadi pengelola data dan informasi di organisasi; dan
- f. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan layanan kepastakaan yang menjadi salah satu sumber ilmu bagi Insan Ombudsman RI dan Masyarakat.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan pada bagian kelima pasal 54 bahwa Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat dan pengelolaan teknologi informasi. Kemudian pada pasal 55 disebutkan bahwa Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat;
- b. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
- c. pengelolaan data dan layanan kepastakaan;
- d. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan hubungan masyarakat dan teknologi informasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Biro.

A. Kelompok Kerja/Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Kelompok Kerja/Layanan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi: Penyusunan pemberitaan, publikasi dan pengelolaan dokumentasi; Pengelolaan hubungan antar lembaga, dan Pengelolaan kemitraan strategis dan jejaring masyarakat.

B. Kelompok Kerja/Layanan Data Informasi dan Teknologi Informasi

Kelompok Kerja/Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi: Pengelolaan infrastruktur teknologi; Pengelolaan pengembangan aplikasi; Pengelolaan keamanan informasi dan jaringan; dan Pengelolaan data dan informasi.

C. Kelompok Kerja/Layanan Kepustakaan

Kelompok Kerja/ Layanan Kepustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan layanan kepastakaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi Pengelolaan data dan layanan kepastakaan.

1.3.Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia (SDM)

1.3.1. Struktur Organisasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Kepala Biro (setingkat Eselon II.a); b. Subbagian Tata Usaha (setingkat Eselon IV); c. Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Humas, Pranata Komputer, Statistisi, dan Pustakawan), dan d. Jabatan Pelaksana (JFU), dengan rincian sebagai berikut:

1) Kepala Biro

Kepala Biro memiliki tugas sebagai Kepala atau Pemimpin Unit Kerja setingkat Eselon II di Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha dan administrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidangnya.

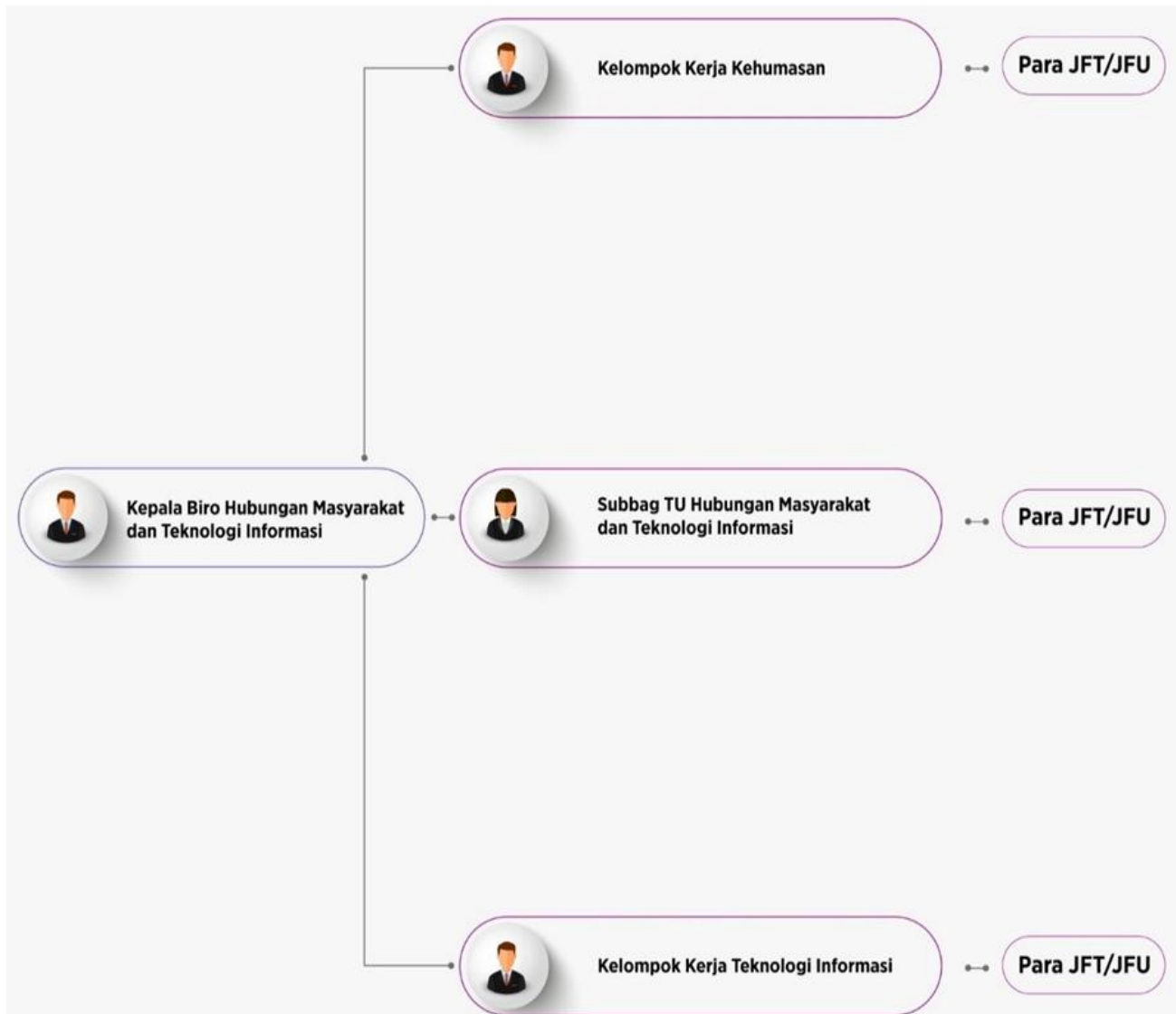
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada Tahun 2024 juga telah membuat Tim/Kelompok Kerja, yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro (Eselon II) selaku Pimpinan di unit kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Layanan Kehumasan (Koordinator)

- a. Tim Kerja Peliputan, Dokumentasi, dan Media Sosial (Ketua)
- b. Tim Kerja Informasi dan Perpustakaan (Ketua)
- c. Tim Kerja Publikasi dan Kehumasan (Ketua)

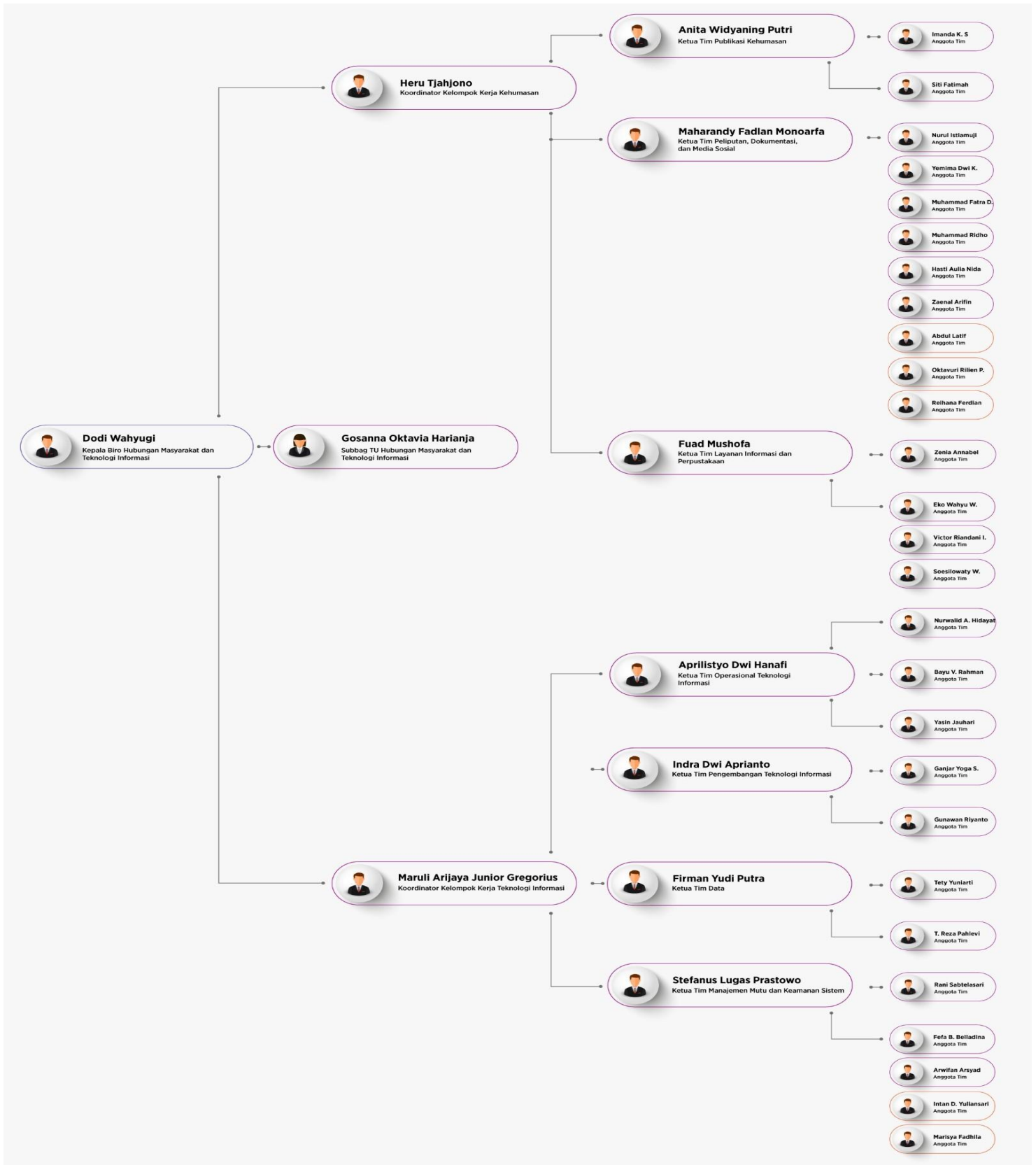
2. Kelompok Kerja Layanan Teknologi Informasi (Koordinator)

- a. Tim Kerja Pengembangan Teknologi Informasi/ITD (Ketua)
- b. Tim Kerja Operasional Teknologi Informasi/ITO (Ketua)
- c. Tim Kerja Data (Ketua)
- d. Tim Kerja Manajemen Mutu dan Keamanan Sistem (Ketua)



Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 Orang baik di Kantor Pusat maupun Perwakilan, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Biro, 2 (dua) orang Jabatan Fungsional Ahli Madya, 7 (tujuh) orang Jabatan Fungsional Ahli Muda, 6 (enam) orang Jabatan Fungsional Ahli Pertama, 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional Tingkat Terampil, 17 (tujuh belas) orang Staf Pelaksana/Fungsional Umum di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan, 2 (dua) orang Staf Sekretariat/Tenaga Pendukung, dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha Biro.



Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi didukung sumber daya manusia sejumlah 38 orang, 7 diantaranya di Kantor Perwakilan sedangkan di Kantor Pusat sebanyak 31 orang terdiri atas: 1 orang Eselon II, 9 orang jabatan fungsional, 18 orang jabatan pelaksana (JFU), 1 orang Subbagian Tata Usaha dan 2 orang tenaga pendukung (Staf Sekretariat), dengan struktur dan rincian tugas/fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Biro : 1 Orang,
2. Kepala Subbagian Tata Usaha : 1 Orang,
3. Jabatan Fungsional Tertentu
 - Pranata Komputer* : 9 Orang,
 - Pranata Humas* : 6 Orang,
4. Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana
 - Kantor Pusat* : 19 Orang,
 - Kantor Perwakilan* : 7 Orang,
5. Tenaga Pendukung : 2 Orang.

No	Nama	Jabatan
1	Dodi Wahyugi	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
2	Heru Tjahjono	Pranata Humas Madya
3	M.A Junior Gregorius	Pranata Komputer Madya
4	Maharandy Fadlan Monoarfa	Pranata Humas Madya
5	Fuad Mushofa	Pranata Humas Madya
6	Anita Widyaning Putri	Pranata Humas Madya
7	Aprilistyo Dwi Hanafi	Pranata Komputer Muda
8	Firman Yudi Putra	Pranata Komputer Muda
9	Stefanus Lugas Prastowo	Pranata Komputer Muda
10	Indra Dwi Aprianto	Pranata Komputer Muda
11	Gosanna Oktavia Harianja	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro

12	Rani Sabtelasari	Pranata Komputer Pertama
13	Nurul Istiamuji	Pranata Humas Pertama
14	Yemima Dwi Kurnia	Pranata Humas Pertama
15	Siti Fatimah	Pengelola Administrasi Pemerintahan
16	Muhammad Fatra Dasa Mura	Jurnalis
17	Gunawan Riyanto	Pranata Komputer Pertama
18	Ganjar Yoga Supratama	Pranata Komputer Pertama
19	Bayu Victoria Warman	Pranata Komputer Terampil
20	Nurwalid Akhri Hidayat	Analisis Sistem Informasi
21	Fefa Bianca Belladina	Pengelola Sistem dan Jaringan
22	Muhammad Ridho	Operator Komputer Grafis
23	Eko Wahyu Wijiantoro	Pengelola Pengadministrasi Negara
24	Zenia Annabel	Pustakawan Pertama
25	Tety Yuniarty	Analisis Sistem Informasi
26	Imanda Kartika Sari	Analisis Hubungan Antar Lembaga
27	Hasti Aulia	Jurnalis
28	Yasin Jauhari	Pranata Teknologi Informasi Komputer
29	Victor Riandani Iwisara	Pustakawan Terampil
30	Soesilowaty Widarshanty	Staf Sekretariat/ Tenaga Pendukung
31	Zaenal Arifin	Staf Sekretariat/ Tenaga Pendukung
32	<i>Tengku Reza Pahlepi</i>	<i>Statistisi Terampil</i>
33	<i>Abdul Latif (Jambi)</i>	<i>Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat</i>
34	<i>Reihana Ferdian (Jambi)</i>	<i>Analisis Humas</i>
35	<i>Oktavuri R.P (Maluku)</i>	<i>Analisis Publikasi</i>
36	<i>Marisya Fadhila (Sumbar)</i>	<i>Pengelola Instalasi Teknologi Informasi</i>
37	<i>Intan Dewi (Bengkulu)</i>	<i>Pengelola Sistem dan Jaringan</i>
38	<i>Arwifan Arsyad (Sulsel)</i>	<i>Pengelola Teknologi Informasi</i>

Daftar nama Pegawai dan Jabatan di Biro HMTI (Kantor Pusat dan Perwakilan)

BAB II

RENCANA KINERJA

1.1. Penetapan Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi serta struktur organisasi. Program dan Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi terdiri dari 3 (tiga) Layanan, yaitu: Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Data dan Informasi (Data Informasi dan Teknologi Informasi), dan Layanan Perpustakaan (Umum). Melaksanakan sasaran kegiatan, indikator, dan target sesuai Perjanjian Kinerja. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi yang diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah menandatangani Perjanjian Kinerja (unit eselon II).

Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi - Aspek Implementasi (33,3%) 1. Capaian Rincian Output 2. Nilai Efisiensi Unit Kerja 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 4. Penyerapan Anggaran - Aspek Manfaat (66,7%)	2,95 (Skala 4)
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan	6

Dalam perjanjian kinerja tersebut, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki 2 indikator kinerja, yakni indeks kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dengan target skala 2,95 dari indeks 4, serta Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan dengan target 6 Dokumen.

1. Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
Terdiri dari Aspek Implementasi (33,3%) dan Aspek Manfaat (66,7%). Berikut rincian aspek implementasi dan aspek manfaat:

Aspek Implementasi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Aspek Implementasi	Bobot
Capaian Rincian Output	16,93%
Nilai Efisiensi Unit Kerja	71,01%
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	66,67%
Penyerapan Anggaran	11,56%
Total Nilai Aspek Implementasi	166,17%

Aspek Manfaat Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Aspek Manfaat	Bobot	Target
Nilai keterbukaan informasi publik	25%	88
Indeks SPBE	20%	2,75
Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI	20%	3
Nilai SAKIP Biro Humas dan TI	10%	75
Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro Humas dan TI	5%	B
Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI	5%	100%
Nilai pengelolaan arsip Biro Humas TI	5%	75,26
Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui <i>coaching/mentoring/counseling</i> (CMC)	5%	75%
Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	5%	100%
Total Nilai Aspek Manfaat	100%	

2. Jumlah Dokumen Laporan Triwulan/Tahunan

Terdiri dari laporan triwulan I, II, III dan IV Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi tahun 2024, Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024, serta Laporan Tahunan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024.

Perjanjian kinerja (Kepala Unit Kerja) ini kemudian akan dievaluasi setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran. Realisasi perjanjian kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI			
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	2,95	
	Jumlah Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6	
KRO/RO/KOMPONEN		ANGGARAN	
KRO1	: Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp	1.362.477.000,00
RO1	: Layanan Hubungan Masyarakat	Rp	664.417.000,00
RO2	: Layanan Umum	Rp	201.967.000,00
RO3	: Layanan Data dan Informasi	Rp	496.093.000,00
KRO2	: Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp	1.385.400.000,00
RO1	: Layanan Perkantoran	Rp	1.385.400.000,00
Komp1	: Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp	1.385.400.000,00
TOTAL		Rp	2.747.877.000,00
Jakarta, Januari 2024			
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,		KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI,	
			
Suganda Pandapotan Pasaribu NIP. 197309161993111001		Dodi Wahyugi NIP. 198106222003121003	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Analisis Kinerja

Berikut Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi di Tahun 2024:

Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi - Aspek Implementasi (33,3%) 1. Capaian Rincian Output 2. Nilai Efisiensi Unit Kerja 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 4. Penyerapan Anggaran - Aspek Manfaat (66,7%)	2,95 (Skala 4)	3,56 (Skala 4)
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan	6	6

Pengukuran kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diharapkan. Untuk menghitung indeks kinerja Biro dilakukan pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja Kelompok Kerja/Layanan pada Biro Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Perjanjian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah terealisasi melebihi target yang telah ditentukan.

2.2. Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

didapatkan dari realisasi atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada awal tahun 2024, sehingga kinerja Biro *measureable* dan *accountable*.

Berikut perhitungan capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi:

a. Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Perhitungan Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi berdasar pada aspek implementasi dengan bobot 33,3% dan aspek manfaat dengan bobot 66,7%.

Aspek implementasi diukur dengan memperhatikan capaian rincian output (16,93%), nilai efisiensi unit kerja (71,01%), konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (66,67%), dan penyerapan anggaran (11,56%).

Sedangkan Aspek manfaat diukur dengan memperhatikan Nilai keterbukaan informasi publik (95,43%), Indeks SPBE (79%), Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI (84%), Nilai SAKIP Biro Humas dan TI (73,75%), Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro Humas dan TI (100%), Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI (100%), Nilai pengelolaan arsip Biro Humas TI (78,63%), Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui *coaching/mentoring/counseling* (CMC) (100%), dan Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu (67%).

Berikut realisasi atas indikator-indikator di atas:

Nilai Aspek Implementasi (Bobot 33,3%)

Aspek Implementasi	Bobot	Realisasi	NILAI (Bobot x Realisasi)
Capaian Rincian Output	43,5%	111,32%	17,09%
Nilai Efisiensi Unit Kerja	28,6%	67,21%	87,90%
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2%	100,00%	100,00%
Penyerapan Anggaran	9,7%	99,45%	2,21%
Total Nilai Aspek Implementasi	100%		99,47

Pada aspek implementasi, realisasi Capaian Rincian Output sebesar 111,32% dengan bobot 43,5% sehingga nilai yang diambil dari Capaian Rincian Output sebesar 17,09. Realisasi Nilai Efisiensi Unit Kerja sebesar 67,21% dengan bobot 28,6% sehingga nilai yang diambil dari Nilai Efisiensi Unit Kerja sebesar 87,90. Realisasi Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 100,00% dengan bobot 18,2% sehingga nilai yang diambil dari Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 100,00. Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 99,45% dengan bobot 9,7% sehingga nilai yang diambil dari Penyerapan Anggaran sebesar 2,21.

Total nilai Aspek Implementasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sebesar **99,47**.

Capaian Rincian Output

Capaian RO		Mar	Jun	Sep	Des
4192	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	27,20%	51,42%	81,29%	111,32%
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	31,60%	54,25%	93,87%	133,96%
4192.EBA.962	Layanan Umum	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

Capaian Rincian Output Tahun 2024

Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan

Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan		Mar	Jun	Sep	Des
4192	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	100%	100%	100%	100%
4192.EBA.962	Layanan Umum	100%	100%	100%	100%
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%

Konsistensi Penyerapan Anggaran Tahun 2024

Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran		Mar	Jun	Sep	Des
4192	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	17,33%	25,25%	38,48%	99,45%
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	25,71%	36,03%	52,82%	99,44%
4192.EBA.962	Layanan Umum	12,85%	29,64%	53,38%	100,00%
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	10,24%	14,18%	22,02%	99,35%

Penyerapan Anggaran Tahun 2024

Nilai Efisiensi Unit Kerja

Nilai Efisiensi		Mar	Jun	Sep	Des
4051	Perencanaan dan Keuangan	77,34%	98,52%	100,00%	67,21%
4051.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				
	Penyerapan	25,71%	36,03%	52,82%	99,44%
	Capaian RO	31,60%	54,25%	93,87%	133,96%
	Capaian RO yang diperhitungkan	31,60%	54,25%	93,87%	120,00%
	Efisiensi	5,90%	18,22%	41,05%	20,56%
	Efisiensi yang diperhitungkan	5,90%	18,22%	20,00%	20,00%
	Nilai Efisiensi	64,74%	95,55%	100,00%	100,00%
4051.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				
	Penyerapan	12,85%	29,64%	53,38%	100,00%
	Capaian RO	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	Capaian RO yang diperhitungkan	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	Efisiensi	12,15%	20,36%	21,62%	0,00%
	Efisiensi yang diperhitungkan	12,15%	20,00%	20,00%	0,00%
	Nilai Efisiensi	80,38%	100,00%	100,00%	50,00%
4051.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan				
	Penyerapan	10,24%	14,18%	22,02%	99,35%
	Capaian RO	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	Capaian RO yang diperhitungkan	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	Efisiensi	14,76%	35,82%	52,98%	0,65%
	Efisiensi yang diperhitungkan	14,76%	20,00%	20,00%	0,65%
	Nilai Efisiensi	86,90%	100,00%	100,00%	51,62%

Nilai Efisiensi Unit Kerja Tahun 2024

Aspek Manfaat	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Nilai (Bobot x Realisasi)
Nilai keterbukaan informasi publik	25%	88	95	95,43%	23,8575
Indeks SPBE	20%	2,75	3,93	78,60%	16
Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI	20%	3	3,34	83,50%	16,7
Nilai SAKIP Biro Humas dan TI	10%	75	73,75	73,75%	7,375
Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro Humas dan TI	5%	B	100	100%	5
Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI	5%	100%	100%	100%	5

Nilai pengelolaan arsip Biro Humas TI	5%	75,26	78,63	78,63%	3,9315
Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui <i>coaching/mentoring/counseling</i> (CMC)	5%	75%	100	100%	5
Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	5%	100%	66,67	66,67%	3,3335
Total Nilai Aspek Manfaat	100%				85,9175

Nilai Aspek Manfaat (Bobot 66,7%)

Pada Aspek Manfaat, realisasi Nilai atas Nilai keterbukaan informasi publik 95 atau 95,43% dari target 88, nilai yang diambil dari indikator sebesar 25% dari 95,43%, yakni 23,85.

Realisasi Indeks SPBE 3,93 atau 79% dari target 2,75, nilai yang diambil dari indikator Indeks SPBE sebesar 20% dari 3,93, yakni 16.

Realisasi Nilai Kepuasan Pengguna Layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 3,34 atau 84% dari target 3, nilai yang diambil dari Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Humas dan TI sebesar 20% dari 3,34 yakni 16,7.

Realisasi Nilai SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 73,75 atau 73,75% dari target 75, nilai yang diambil dari indikator Nilai RB sebesar 10% dari 73,75, yakni 7,375.

Realisasi Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi A atau 100% dari target B, nilai yang diambil dari indikator sebesar 5% dari 100 yakni 5.

Realisasi Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap Pegawai pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 100 atau 100% dari target 100%, nilai yang diambil dari indikator sebesar 5% dari 100% yakni 5.

Realisasi Nilai Pengelolaan Arsip Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi 78,63 (Skala 100) atau 78,63% dari target 75,26 (Skala 100), nilai yang diambil dari indikator sebesar 5% dari 78,63% yakni 3,9315.

Realisasi Rasio Pegawai yang Meningkatkan Kinerjanya melalui Coaching/ Mentoring/ Counseling (CMC) 100 atau 100% dari target 75, nilai yang diambil dari indikator sebesar 5% dari 100% yakni 5.

Realisasi Persentase Tindak Lanjut Unit Kerja atas Temuan Aduan, dan Saran Penjaminan Mutu 66,67 atau 100% dari target 100, nilai yang diambil dari indikator sebesar 100% dari 67% yakni 3,3335.

Total nilai Aspek Manfaat pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi senilai **85,9175**.

Dokumen hasil kinerja atas aspek implementasi kinerja capaian output tiap layanan Rincian Output (RO), sebagai berikut:

1. Layanan Hubungan Masyarakat

Laporan Pengelolaan Media Sosial, Laporan Pengelolaan Call Center, Laporan Pengelolaan Website, Laporan Pengelolaan Media Monitoring, Laporan Dokumentasi dan Peliputan, Laporan Indeks Kepuasan Layanan Informasi, Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Laporan Triwulan I, II, III, IV Layanan Hubungan Masyarakat, Laporan Tahunan Layanan Hubungan Masyarakat.

2. Layanan Data dan Informasi (Data Informasi dan Teknologi Informasi)

Laporan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Laporan Pengelolaan Keamanan Jaringan, Laporan Pengelolaan Pengembangan Aplikasi, Laporan Pengelolaan SPBE, Laporan Pengelolaan Sisdatin, Laporan, Laporan Triwulan I, II, III, IV Layanan Data dan Informasi, Laporan Tahunan Layanan Data dan Informasi.

3. Layanan Perpustakaan (Umum)

Laporan Pembangunan Pojok Baca Ombudsman (PBO), Laporan Pembangunan Pojok Baca Digital (Pocadi), Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan, Laporan Triwulan I, II, III, IV Layanan Perpustakaan, Laporan Tahunan Layanan Perpustakaan.

Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Bobot	Realisasi	NILAI $\frac{(Bobot \times 4) \times Realisasi}{100}$
Aspek Implementasi	33,3%	95,49	1,27
Aspek Manfaat	66,7%	85,92	2,29
TOTAL Nilai Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi			3,56

Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Berdasarkan perhitungan sebelumnya telah diketahui bahwa total nilai Aspek Implementasi 95,49 dan total nilai Aspek Manfaat 9. Sehingga dapat dilakukan perhitungan Nilai Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dengan memasukkan rumus:

$$\frac{(Bobot \times 4) \times Realisasi}{100}$$

Didapatkan nilai yang diambil dari Aspek Implementasi sebesar 1,27 dan Aspek Manfaat sebesar 2,29. Total Nilai Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sebesar **3,60** dari skala 4 atau sebesar 120,68% ada kenaikan 23% dari target 2,93 dengan indeks skala 4.

b. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan

Pada Tahun 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah Menyusun 6 Dokumen Pelaporan yang terdiri dari: Laporan Triwulan I Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024, Laporan Triwulan II Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024, Laporan Triwulan III Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024, Laporan Triwulan IV Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024, Laporan Tahunan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024, dan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024.

Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	2,95 (Skala 4)	3,56 (Skala 4)	120,68 %	2,93 (Skala 4)	3,60 (Skala 4)	123 %
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan	6	6	100 %	6	6	100 %

Biro Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Indeks Kinerja (Skala 4) Aspek Implementasi: 33,33% Aspek Manfaat: 66,67%	2,67	2,84	3,01	3,10	3,18	3,24	3,27	3,36	3,44	3,52	3,51	3,56
Aspek Implementasi (%)	28,06	40,93	53,83	60,85	66,33	71,19	73,05	79,80	85,89	91,88	91,58	95,49
Aspek Manfaat (%)	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92

Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi di Tahun 2023 dan 2024, terdapat perbedaan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan indikator dalam Aspek Manfaat yaitu Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu dan penurunan nilai Nilai pengelolaan Arsip Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi di Tahun 2024 ini.

a. Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Realisasi Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024 sebesar 3,56 (Skala 4) dari target 2,95 (Skala 4) dengan capaian 120,68%, sedangkan realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,60 (Skala 4) dari target 2,93 (Skala 4) dengan capaian 123%.

Pada tahun 2024 ini, digunakan rumusan perhitungan baru dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atas hal tersebut maka perhitungan Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024 dipengaruhi oleh dua aspek, yakni Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat. Sedangkan Tahun 2022 dengan perhitungan yang sama juga, yaitu: dipengaruhi oleh dua aspek, yakni Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat.

b. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan

Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Kinerja 2023, Laporan Tahunan 2023 dan Laporan Triwulan 2024 sebesar 6 dokumen dari target 6 dokumen dengan capaian 100%.

Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	212	Laporan Kegiatan	284	133,96%
Layanan Umum	1	Layanan	0,5	100,00%
Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	0,5	100,00%

2.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada Pagu Awal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Pagu Awal Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi TA. 2024

Kode	Uraian RO/Komponen/Sub_Komponen/Akun/Detail	Vol.	Sat.	Jumlah
4192	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi			2.189.710.000
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	212	Laporan	970.007.000
4192.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	196.516.000
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.023.187.000

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2024 ini Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi (Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi) Program Dukungan Manajemen Ombudsman Republik Indonesia didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebesar Rp 3.859.103.000, dengan jumlah anggaran yang diblokir (Automatic Adjustment) senilai Rp 649.928.000, sehingga anggaran yang bisa digunakan senilai Rp 3.209.175.000. dengan rincian sebagai berikut:

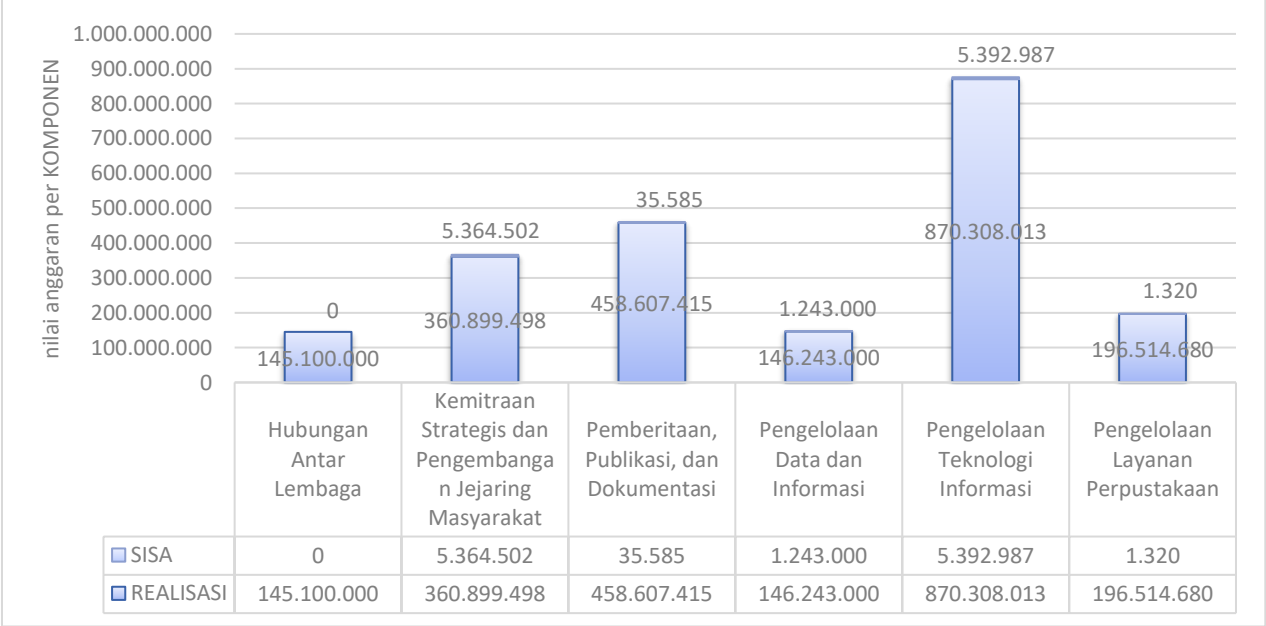
- *Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi* (Layanan Dukungan Manajemen Internal) sebesar Rp 2.473.703.000, dengan jumlah anggaran yang diblokir (Automatic Adjustment) senilai Rp 646.757.000, sehingga anggaran yang bisa digunakan senilai Rp 1.826.946.000
- *Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan* (Layanan Perkantoran - Operasional dan Pemeliharaan Kantor) sebesar Rp 1.385.400.000, dengan jumlah anggaran yang diblokir (Automatic Adjustment) senilai Rp 3.171.000, sehingga anggaran yang bisa digunakan senilai Rp 1.382.229.000

Realisasi atau penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.557.417.500 atau sebesar 99,59% (Data Realisasi SAS berdasarkan aplikasi SAKTI) dan sebesar Rp 3.200.018.002 atau sebesar 99,71% (Data Realisasi Anggaran Berdasarkan POK Biro HMTI (Tanpa Blokir).

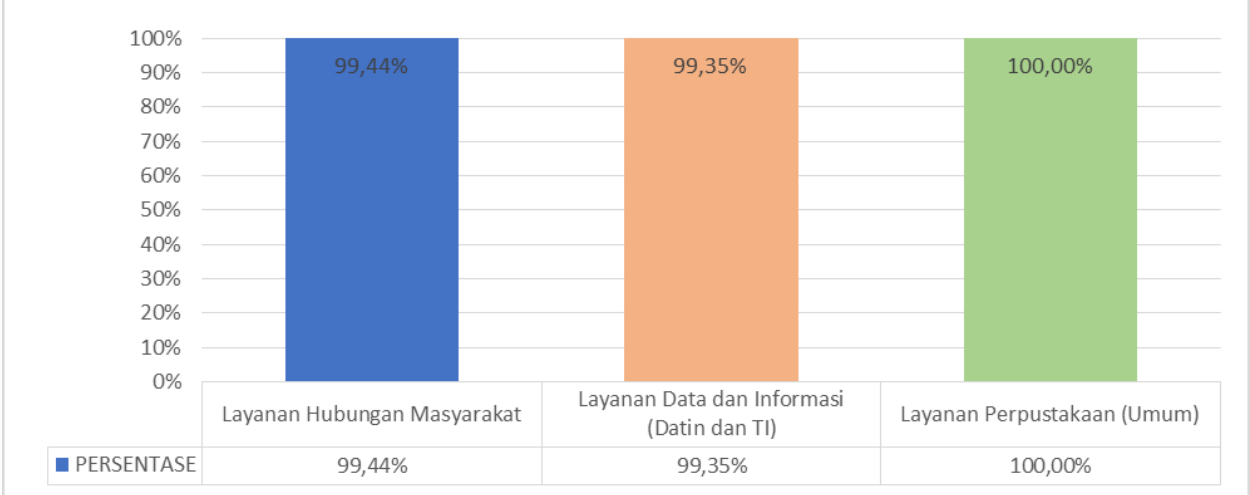
Berikut adalah rincian Pagu, Realisasi, dan Sisa Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

	RO	PAGU Aktif		Blokir	REALISASI Total	Sisa Anggaran	Persentase
		DIPA	DIPA Aktif				
4192	Kehumasan, Data dan Sistem dan Teknologi Informasi	3.796.536.000	3.209.175.000	587.361.000	3.200.018.002	9.156.998	99,71%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.796.536.000	3.209.175.000	587.361.000	3.200.018.002	9.156.998	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	931.103.000	607.243.000	323.860.000	607.207.415	35.585	100%
	051 Hubungan Antar Lembaga	276.410.000	145.100.000	131.310.000	145.100.000	-	
	052 Kemitraan Strategis dan Pengembangan Jejaring Masyarakat	136.050.000	3.500.000	132.550.000	3.500.000	-	
	053 Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentasi	518.643.000	458.643.000	60.000.000	458.607.415	35.585	
						-	
EBA.962	Layanan Umum	223.016.000	196.516.000	26.500.000	196.514.680	1.320	100%
	051 Pengelolaan Layanan Perpustakaan	223.016.000	196.516.000	26.500.000	196.514.680	1.320	
						-	
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.257.017.000	1.023.187.000	233.830.000	1.016.551.013	6.635.987	99%
	051 Pengelolaan Data dan Informasi	289.835.000	147.486.000	142.349.000	146.243.000	1.243.000	
	052 Layanan Pengelolaan Teknologi Informasi	967.182.000	875.701.000	91.481.000	870.308.013	5.392.987	
						-	
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.385.400.000	1.382.229.000	3.171.000	1.379.744.894	2.484.106	100%
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.385.400.000	1.382.229.000	3.171.000	1.379.744.894	2.484.106	

Diagram Realisasi Anggaran



PERSENTASE REALISASI ANGGARAN



Realisasi Anggaran Berdasarkan POK Biro HMTI (Tanpa Blokir)

NO	NOMENKLATUR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	SISA ANGGARAN
1	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	Rp 1.826.946.000	1.820.273.108	99,63%	6.672.892
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.382.229.000	1.379.744.894	99,82%	2.484.106
TOTAL		Rp 3.209.175.000	3.200.018.002	99,71	9.156.998

Berdasarkan Realisasi SAKTI Biro HMTI (Termasuk Sosialisasi Perwakilan)					
NO	NOMENKLATUR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	PAGU ANGGARAN	REALISASI S/D DES	CAPAIAN	SISA ANGGARAN
1	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	Rp 2.189.710.000	2.177.672.606	99,45%	12.037.394
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.382.229.000	1.379.744.894	99,82%	2.484.106
TOTAL		Rp 3.571.939.000	3.557.417.500	99,59	14.521.500

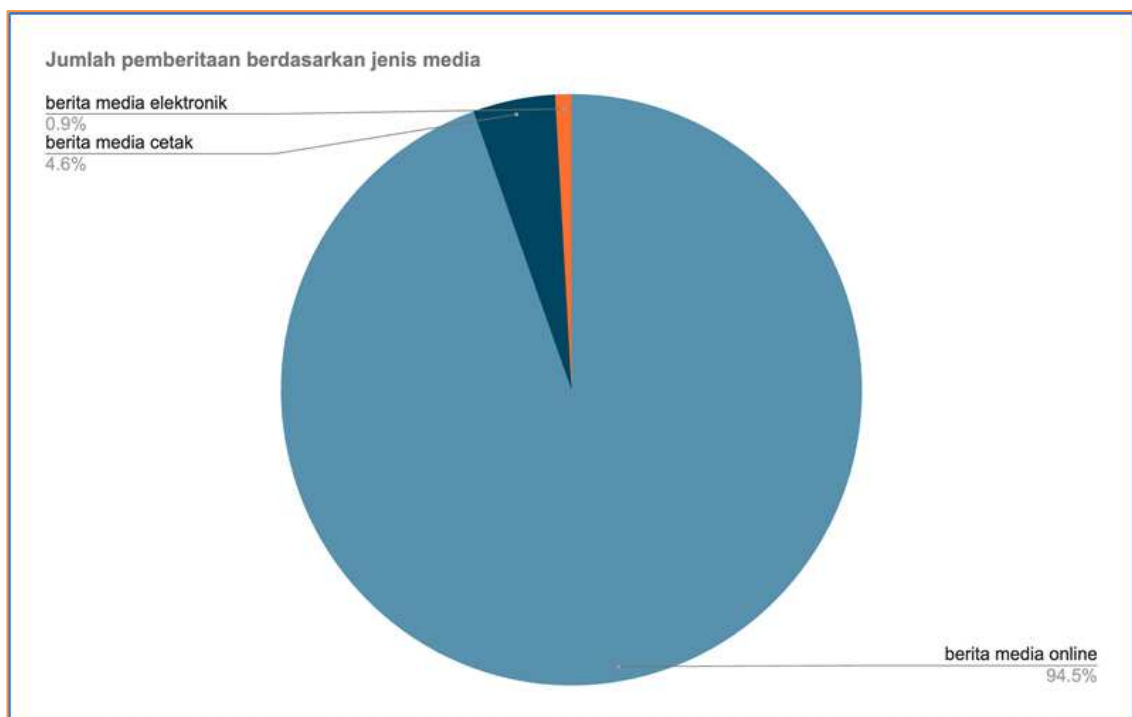
Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA (Layanan Dukungan Manajemen Internal)		2.189.710.000	2.177.672.606	99,45 %	12.037.394
WA.4192	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.189.710.000	2.177.672.606	99,45 %	12.037.394
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	970.007.000	964.606.913	99,44 %	5.400.087
051	Hubungan Antar Lembaga	145.100.000	145.100.000	100,00 %	0
051.0A	Media Relations	25.000.000	25.000.000	100,00 %	0
051.0B	Media Monitoring	115.000.000	115.000.000	100,00 %	0
051.0C	Fasilitasi Koordinasi Antar Lembaga	5.100.000	5.100.000	100,00 %	0
052	Kemitraan Strategis dan Pengembangan Jejaring Masyarakat	366.264.000	360.899.498	98,54 %	5.364.502
052.0A	Sosialisasi oleh Perwakilan	362.764.000	357.399.498	98,52 %	5.364.502
052.0C	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	3.500.000	3.500.000	100,00 %	0
053	Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi	458.643.000	458.607.415	99,99 %	35.585
053.0A	Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan	314.086.000	314.065.694	99,99 %	20.306
053.0C	Pengelolaan Website	132.857.000	132.857.000	100,00 %	0
053.0E	Publikasi Khusus	11.700.000	11.684.721	99,87 %	15.279
EBA.962	Layanan Umum	196.516.000	196.514.680	100,00 %	1.320
051	Pengelolaan layanan perpustakaan	196.516.000	196.514.680	100,00 %	1.320
051.0A	Pengelolaan Perpustakaan	29.329.000	29.329.000	100,00 %	0
051.0B	Pojok Baca Ombudsman	160.187.000	160.185.680	100,00 %	1.320
051.0C	Perpustakaan Digital (E-Library)	7.000.000	7.000.000	100,00 %	0
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.023.187.000	1.016.551.013	99,35 %	6.635.987
051	Pengelolaan Data dan Informasi	147.486.000	146.243.000	99,16 %	1.243.000
051.0A	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi	9.000.000	9.000.000	100,00 %	0
051.0B	Satu Data Ombudsman	138.486.000	137.243.000	99,10 %	1.243.000
052	Layanan Pengelolaan Teknologi Informasi	875.701.000	870.308.013	99,38 %	5.392.987
052.0A	Pemeliharaan Data Center	2.100.000	2.100.000	100,00 %	0
052.0B	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	258.763.000	258.470.000	99,89 %	293.000
052.0C	Pemeliharaan, Monitoring, dan Evaluasi Aplikasi/Sistem Informasi	303.870.000	298.771.000	98,32 %	5.099.000
052.0D	Pemeliharaan Jaringan VPN	148.560.000	148.559.341	100,00 %	659
052.0F	Pengembangan Ombudsman-CSIRT	162.408.000	162.407.672	100,00 %	328

2.4. Keberhasilan Kinerja (Pencapaian)

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada tahun 2024 mencapai dan berhasil dalam melaksanakan kegiatan dan penghargaan, yaitu diantaranya:

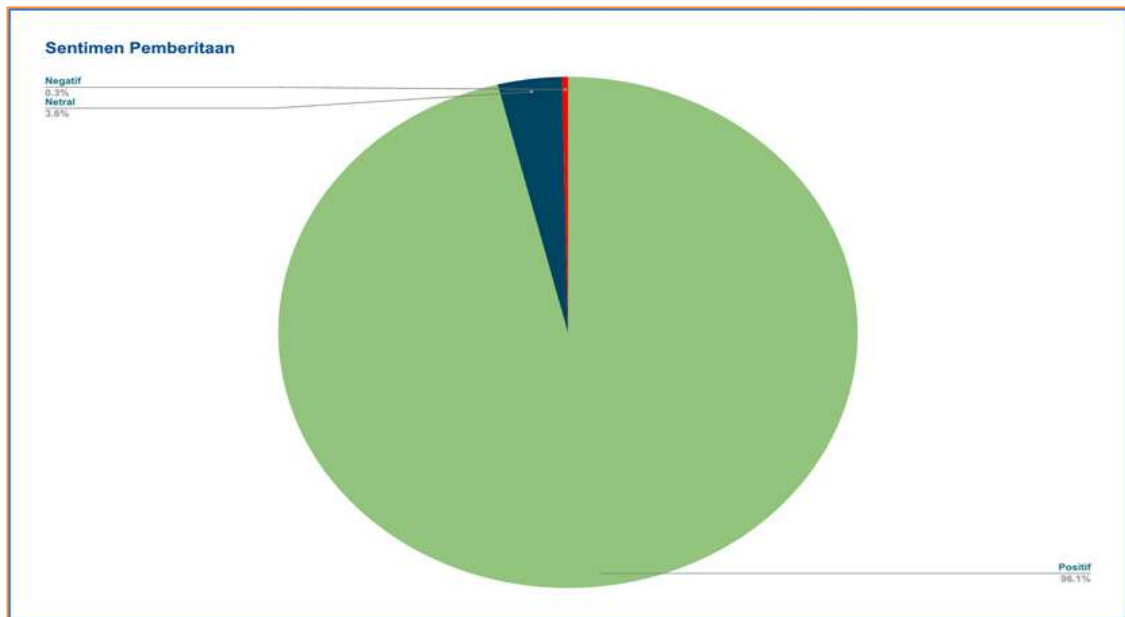
2.4.1. Kelompok Kerja/Layanan Hubungan Masyarakat

Sepanjang tahun 2024 Ombudsman RI muncul dalam pemberitaan di media massa sebanyak 3.1871 artikel berita. Sebaran media terbanyak pada media online dengan total 30.127 ekspos, kemudian 1.456 ekspos pada media cetak, dan 288 tayangan berita televisi.



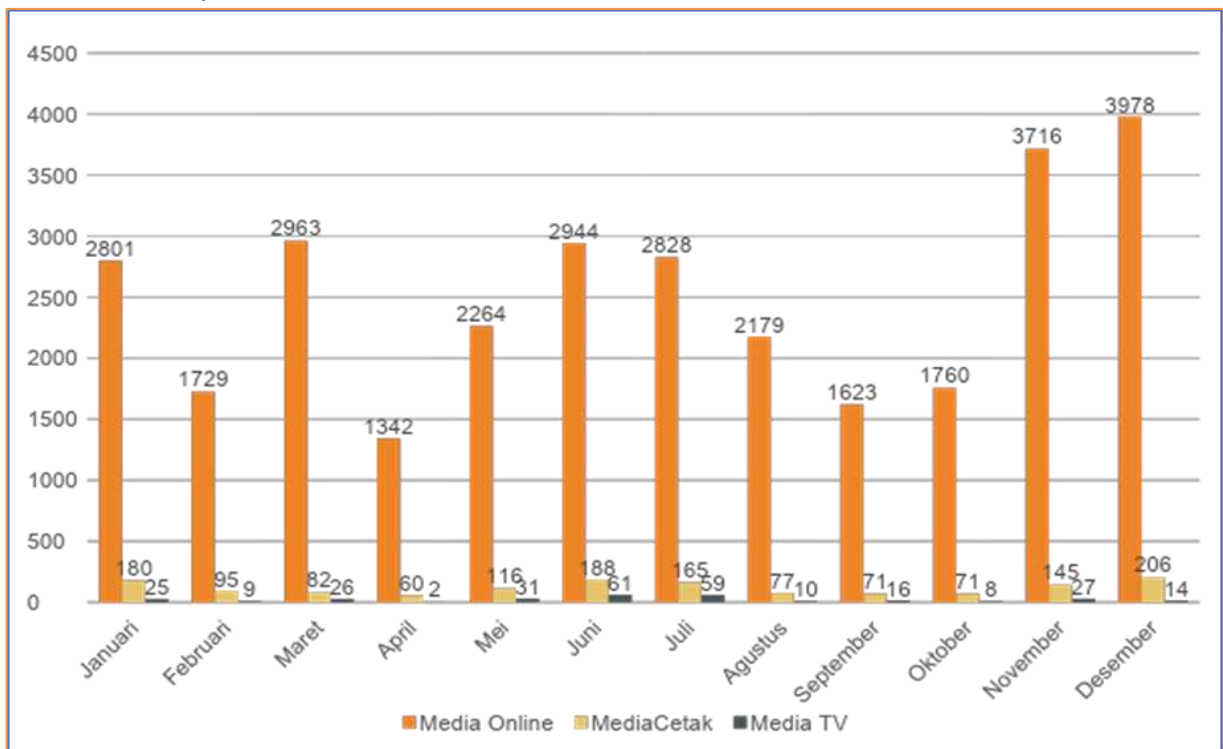
Grafik Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Jenis Media Periode 2024

Media dalam memberitakan Ombudsman RI pada 1 Januari – 31 Desember 2024 cenderung menyebarkan narasi positif yaitu dengan sebaran pemberitaan positif mencapai 30627 ekspos, 1139 ekspos pemberitaan lainnya dengan sentiment netral. Namun, terdapat pemberitaan negatif pada periode ini sebesar 105 pemberitaan, terkait pemberitaan mengenai Ombudsman Sumsel, Insiden Pengusiran Wartawan oleh Oknum Ombudsman, Kepala Ombudsman Maluku Mangkir dari Panggilan KPK, Integritas Soal Fungsi ORI Pusat Dipertanyakan, Ombudsman RI Batalkan Seleksi Kepala Perwakilan 6 Provinsi dan Petinggi Ombudsman Sulteng Dilaporkan ke Bawaslu Gegara WA.



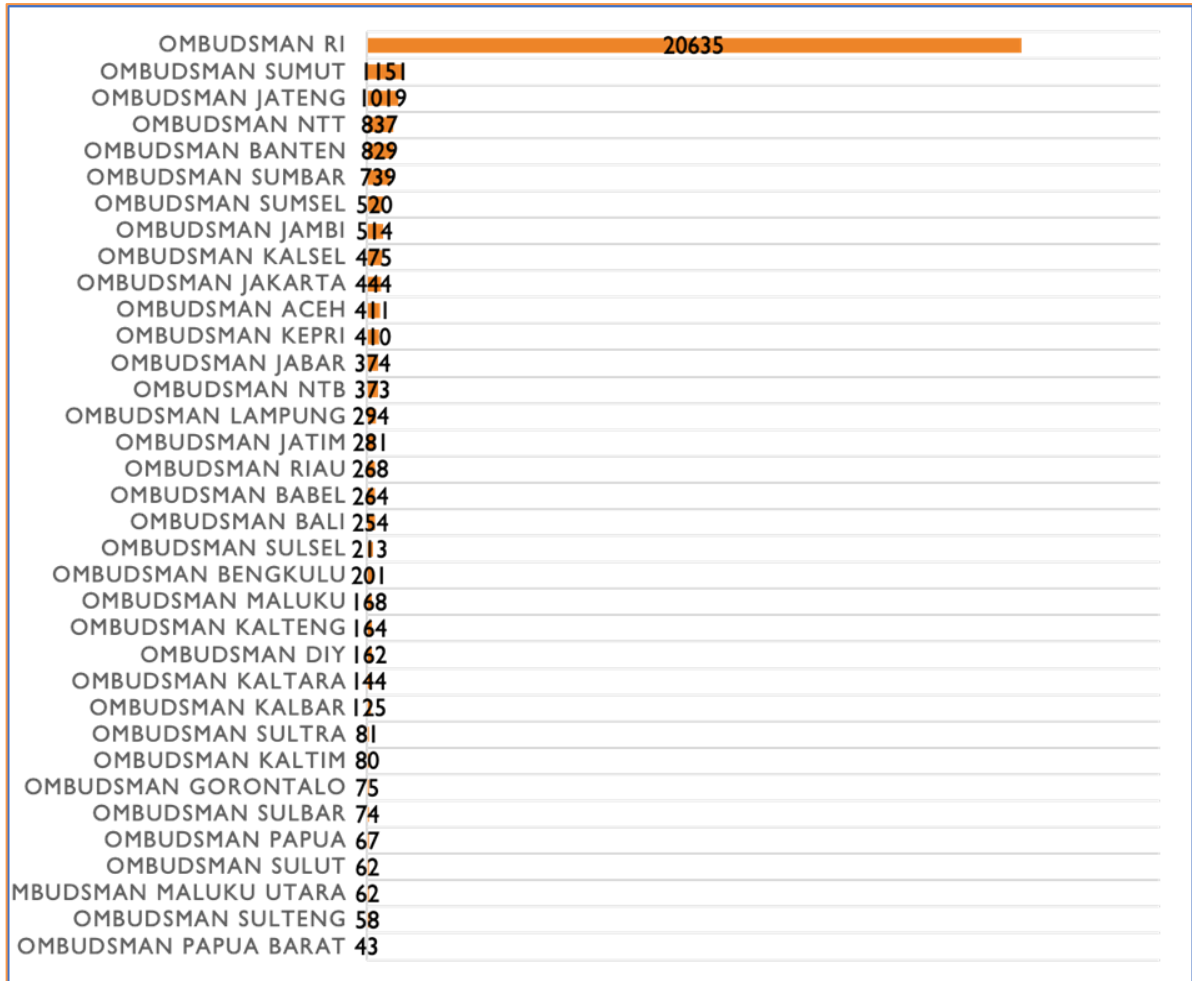
Grafik Sentimen Pemberitaan 2024

Grafik berikut menunjukkan perbandingan total ekspos pemberitaan yang dikutip dari media periode 1 Januari-31 Desember 2024.



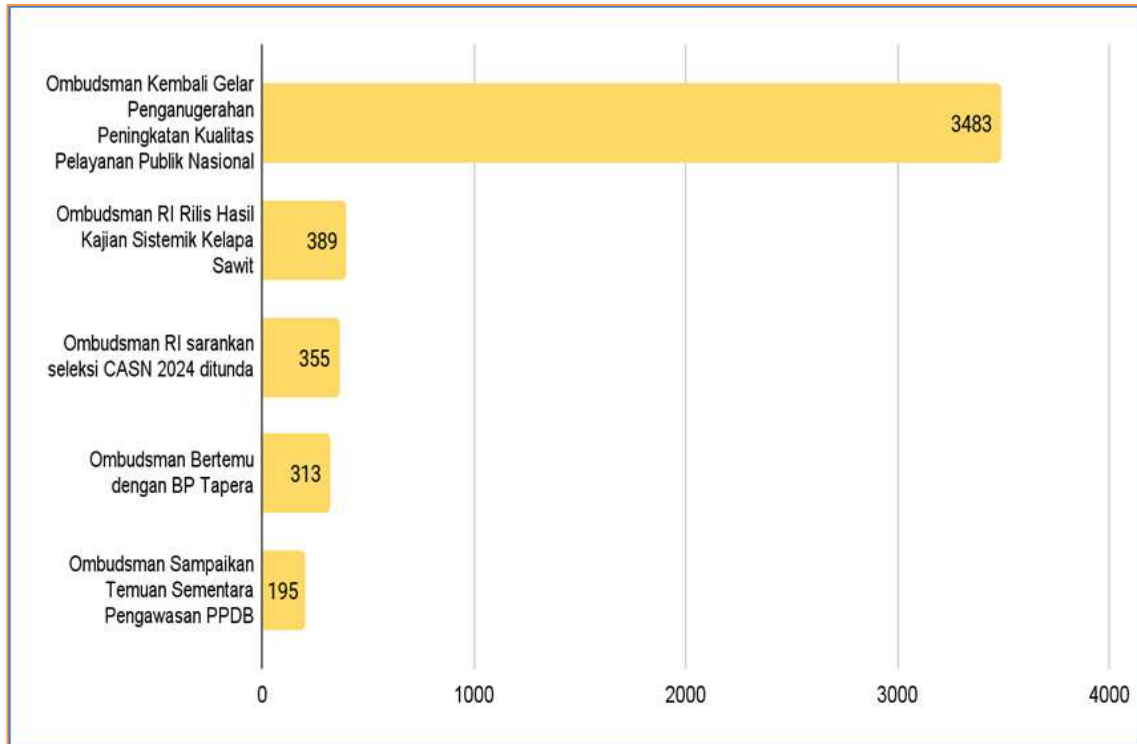
Ekspos Pemberitaan Ombudsman RI Periode Januari - Desember 2024

Grafik berikut menunjukkan perbandingan total ekspos pemberitaan yang dikutip dari media periode 1 Januari-31 Desember 2024 pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia.



Grafik Perbandingan Pemberitaan Pusat dan Perwakilan Ombudsman Periode Januari-Desember 2024

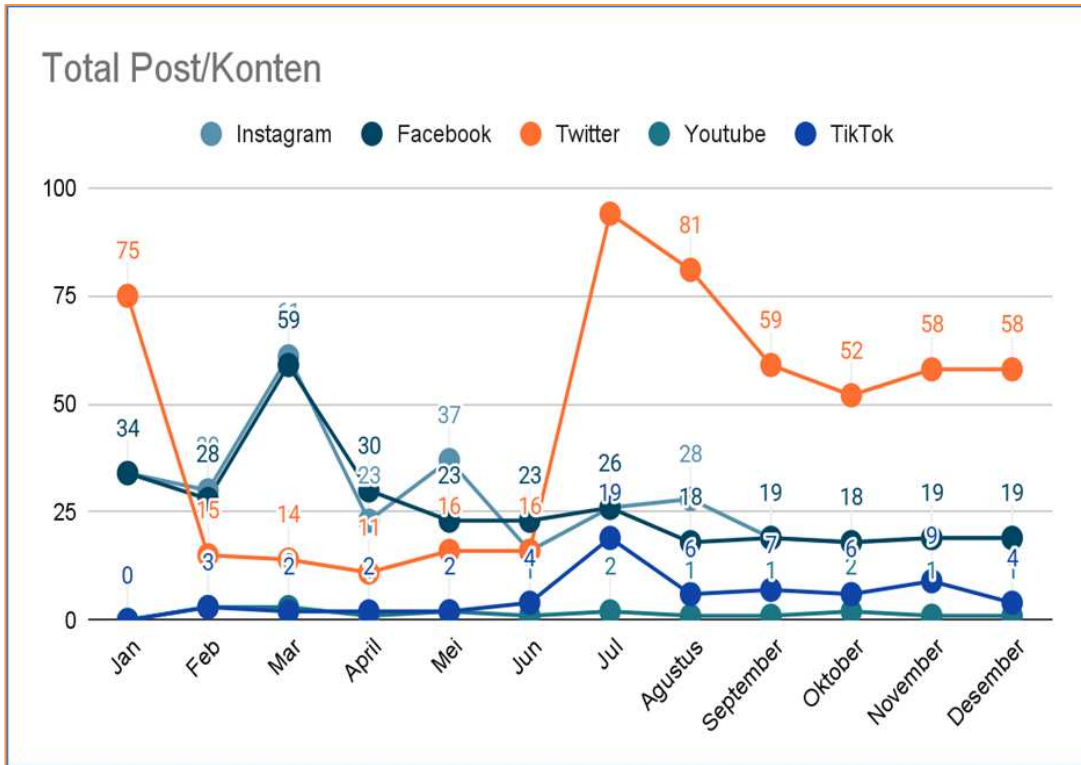
5 topik tertinggi pemberitaan pada 2024 adalah Anugerah Kepatuhan 2024, Hasil Kajian Tata Kelola Kelapa Sawit, Ombudsman Sarankan seleksi CASN ditunda, Pertemuan Ombudsman dengan BP Tapera dan Temuan pengawasan PPDB 2024.



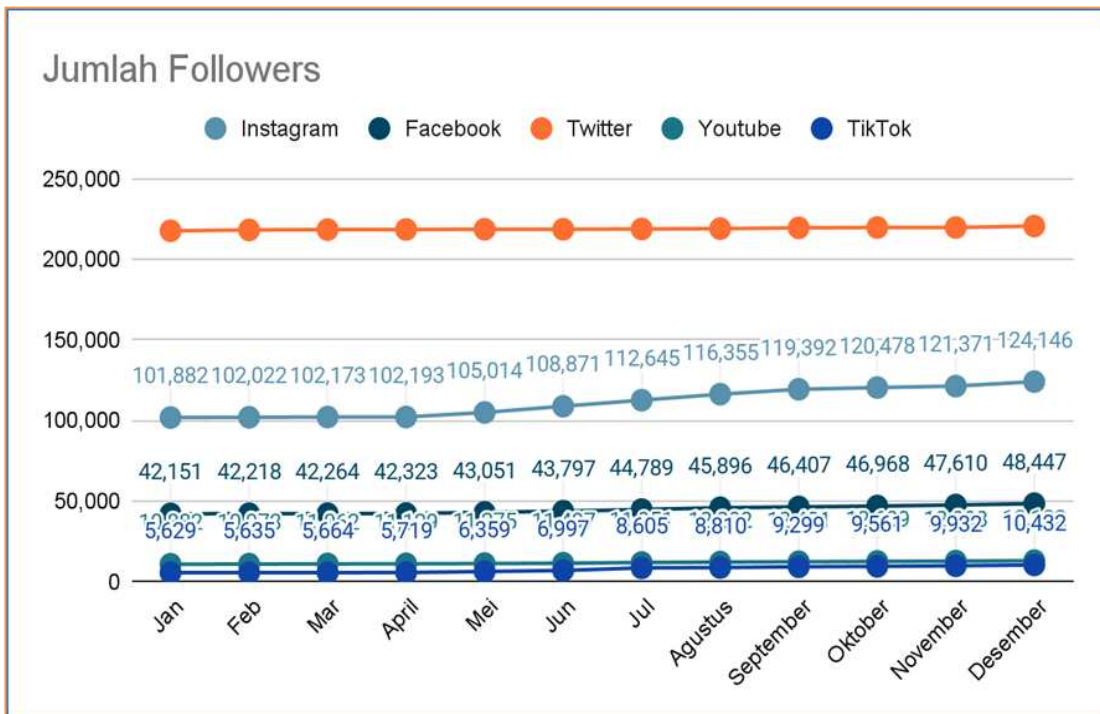
Secara keseluruhan, Ombudsman RI mendapat citra yang baik dalam persepsi media saat merespons suatu isu. Jika melihat dari tren top 20 isu pemberitaan Ombudsman RI selama 2024, topik-topik yang lebih mendapat perhatian media yakni topik-topik yang menunjukkan keberhasilan kinerja Ombudsman RI dalam menyelidiki dan menindaklanjuti penemuan-penemuan potensi maladministrasi di beberapa penyelenggara pelayanan publik.

Pengelolaan Media Sosial

Selama tahun 2024, seluruh kanal media sosial Ombudsman RI memiliki performa yang meningkat. Hal ini disebabkan karena isu-isu yang diangkat dalam media sosial adalah isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik. Adapun kenaikan performa media sosial Ombudsman RI bisa dilihat dari kenaikan jumlah followers (pengikut) per tanggal 31 Desember 2024. Sedangkan apabila dilihat dari jumlah impression (impresi), akun media sosial Ombudsman memiliki data yang fluktuatif yang disebabkan karena adanya jenis konten, isi konten, dan konten yang di-promote dengan bergantung pada jangkauan akun sesuai relevansinya dengan followers atau pengguna.



Grafik Konten Terpublish



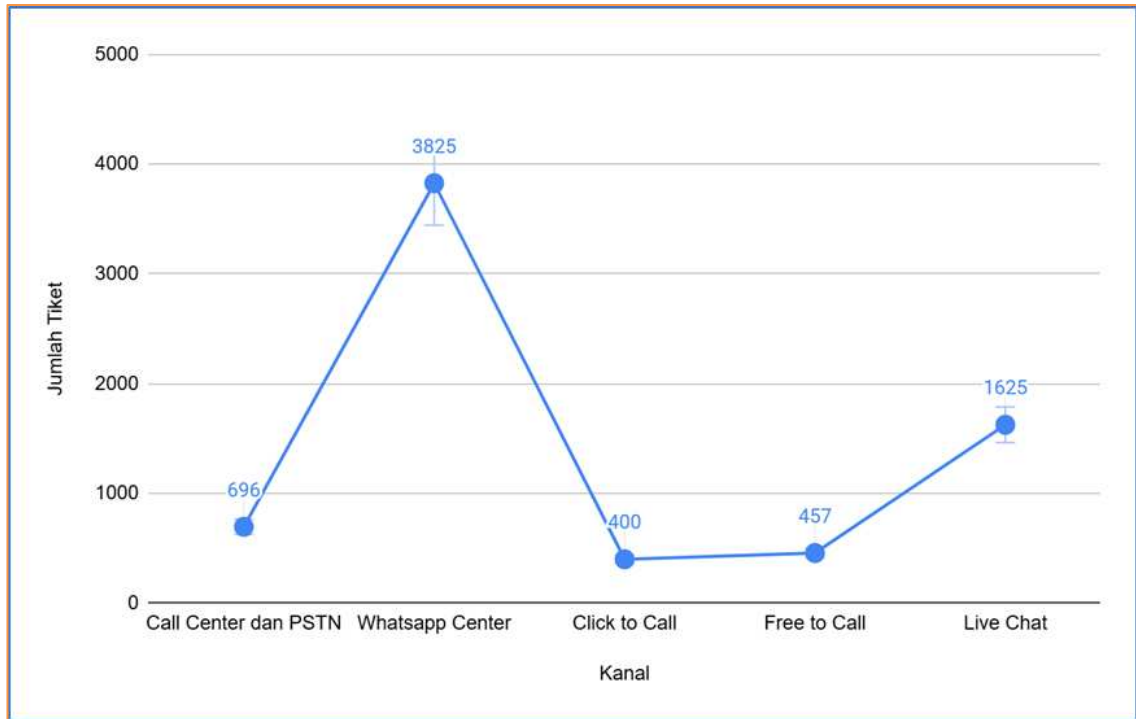
Grafik Jumlah Followers

Pada tahun 2024, penambahan jumlah followers terbesar terjadi di bulan Juli pada seluruh kanal media sosial. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut, terdapat pengumuman terkait Seleksi Calon Asisten Ombudsman RI Tahun 2024 yang sangat diminati oleh para followers, diikuti bulan November dengan konten Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024. Sedangkan, rata-rata konten terpublish setiap bulannya di angka 27 untuk Instagram dan Facebook, 26 untuk Twitter, 2 untuk Youtube dan 5 untuk TikTok. Konten dengan engagement paling tinggi ada pada konten Testimoni Cak Lontong, Penyerahan Kepatuhan, Pengumuman Seleksi Calon Asisten Ombudsman dan quiz, sedangkan konten dengan engagement paling rendah ada pada konten greeting.

Pengelolaan Halo Ombudsman

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, Ombudsman RI memiliki layanan kontak Halo Ombudsman melalui jaringan telepon serta layanan pesan. Halo Ombudsman dapat diakses melalui jaringan telepon di nomor 137 dan 021-22513737, aplikasi pesan Whatsapp pada nomor 082137373737, dan live chat di website www.ombudsman.go.id. Halo Ombudsman pada tahun 2024 dikelola oleh Bagian Humas bersama dengan rekanan PT. Jasnita Telekomindo.

Selama tahun 2024, Halo Ombudsman telah melayani 7.003 tiket dari enam kanal tersebut di atas. Pada grafik di bawah ini terdapat data tiket selama tahun 2024 dari lima kanal (kanal call center dan PSTN digabung). Kanal call center dan PSTN melayani 696 tiket, kanal whatsapp center melayani 3.825 tiket, kanal click to call 400 tiket, kanal free to call 457 tiket dan kanal live chat 1.625 tiket. Kanal whatsapp dan live chat merupakan kanal yang paling banyak digunakan karena kemudahan akses dan berbiaya rendah.



Grafik Call Center

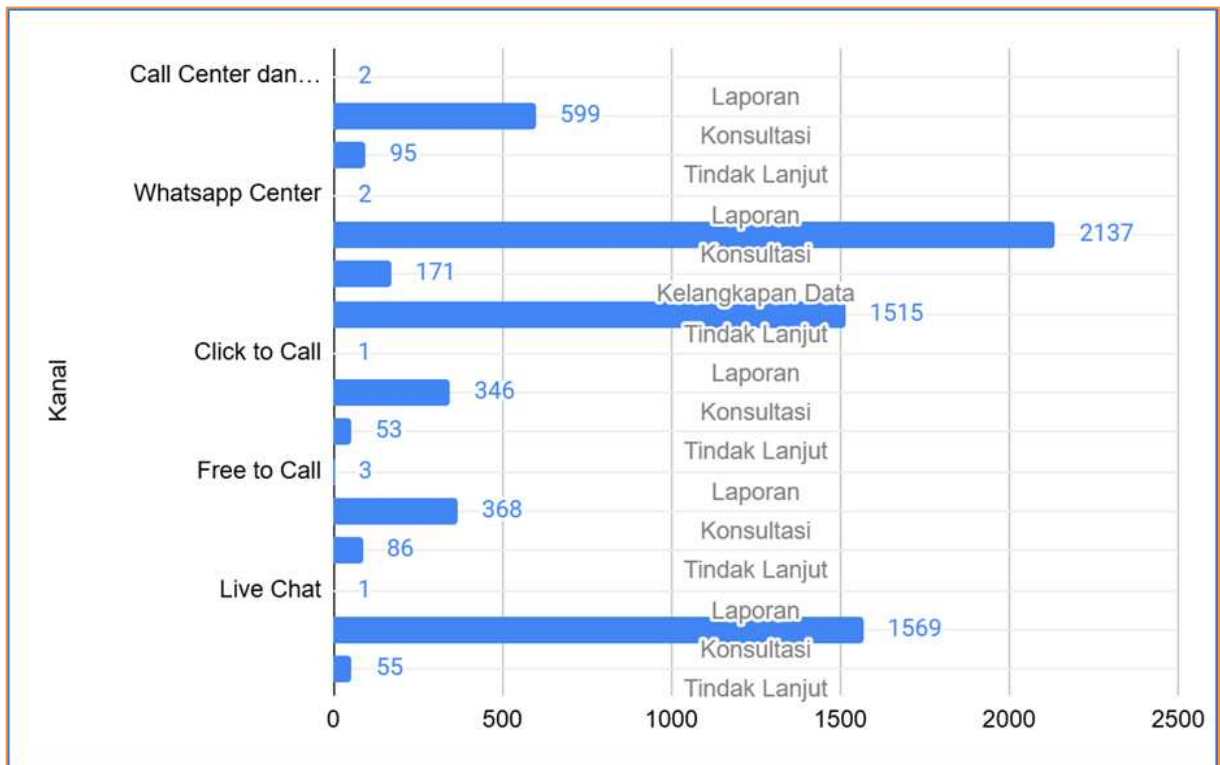
Seluruh tiket tersebut kemudian dibagi menjadi empat jenis tiket yaitu permintaan informasi/konsultasi, penyampaian laporan, tindak lanjut laporan, dan kelengkapan data (khusus kanal whatsapp center). Tabel di bawah ini merupakan rincian layanan tiket berdasarkan jenis tiket

Jenis Laporan	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Juni 2024	Jul 2024	Agt 2024	Sept 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan-Des 2024
Call Center & PSTN													
Laporan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Konsultasi	101	42	52	38	55	66	78	50	27	31	26	33	599
Tindak Lanjut	13	10	12	9	5	7	11	8	6	5	3	6	95
Whatsapp Center													
Laporan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Konsultasi	309	168	79	81	125	124	405	221	180	218	155	72	2137
Kelengkapan Data	50	18	14	8	17	13	9	11	11	2	11	7	171
Tindak Lanjut	160	153	157	107	116	134	75	109	101	123	139	141	1515
Click To Call													
Laporan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Konsultasi	23	22	24	17	20	18	35	21	30	42	42	52	346
Tindak Lanjut	7	5	4	7	0	1	0	4	7	8	3	7	53
Free To Call													
Laporan	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Konsultasi	13	26	40	10	27	28	35	18	43	54	50	24	368
Tindak Lanjut	7	5	3	3	23	3	1	2	6	4	10	19	86
Live Chat													

Laporan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Konsultasi	153	72	91	82	55	109	565	221	120	53	23	25	1569
Tindak Lanjut	4	7	6	3	3	0	7	1	6	13	4	1	55
TOTAL													7.003

Tiket Halo Ombudsman Tahun 2024

Pada tahun 2024, tiket permintaan informasi/konsultasi masih merupakan jumlah tiket paling banyak. Permintaan informasi/konsultasi merupakan pelapor atau masyarakat yang memohon informasi terkait Ombudsman ataupun berkonsultasi mengenai masalah-masalah pelayanan publik yang dialami. Jumlah tiket permintaan konsultasi tahun 2024 adalah 599 pada kanal telepon, 2.137 pada kanal whatsapp, 1.569 pada kanal live chat, 346 pada kanal click to call, dan 368 pada kanal free to call.



Dari ketiga kanal tersebut, jumlah tiket permintaan informasi paling tinggi terdapat pada kanal whatsapp di mana informasi yang paling banyak ditanyakan adalah substansi kepegawaian, administrasi kependudukan, dan ketenagakerjaan.

Kemudian tiket penyampaian laporan dibuat apabila pelapor sudah memberikan data seperti NIK, bukti kirim email ke Unit Pengaduan Masyarakat, dan bukti lainnya yang menyatakan pelapor memang sudah serius membuat laporan. Tiket penyampaian laporan tahun 2024 paling tinggi berasal dari kanal Free Call sebanyak 3 tiket dengan substansi kepegawaian.

Tiket tindak lanjut laporan merupakan tiket yang dibuat jika pelapor atau masyarakat bertanya tentang tindak lanjut atau progress dari laporan yang pernah disampaikan ke Ombudsman baik melalui Halo Ombudsman maupun langsung ke melalui email ke Unit Pengaduan Masyarakat, bersurat atau datang langsung. Tiket tindak lanjut paling tinggi pada tahun 2024 berasal dari kanal Whatsapp yaitu 1.515 tiket.

Tiket kelengkapan data merupakan tiket yang hanya terdapat pada kanal Whatsapp karena memiliki fitur untuk pengiriman dokumen. Pada tahun 2024, tiket kelengkapan data berjumlah 171 dengan substansi terbanyak adalah agraria/pertanahan dan kepegawaian.

Tiket tindak lanjut paling banyak berasal dari kanal Whatsapp pada November 2024 Pada awal Agustus 2024, kanal whatsapp Ombudsman RI telah dimigrasikan ke akun bisnis. Adanya migrasi ke akun bisnis mempermudah pengelolaan pelayanan informasi maupun pelaporan melalui kanal whatsapp. Selain itu, melalui akun bisnis ini whatsapp Ombudsman RI telah memperoleh verifikasi atau centang biru sehingga diharapkan Ombudsman RI akan semakin dipercayai masyarakat.

PPID Ombudsman Meraih Predikat Informatif

Ombudsman RI meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Kualifikasi Informatif untuk Kategori Lembaga Non-Struktural. Dengan nilai 95,43, kualifikasi Informatif ini diraih berturut-turut sejak tahun 2023. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat untuk memberikan penghargaan kepada badan publik yang dengan konsisten dan nyata melaksanakan keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Monev KIP Tahun 2024 diikuti oleh 363 Badan Publik yang terbagi dalam 7 Kategori. Yaitu Kategori Kementerian,

Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik:



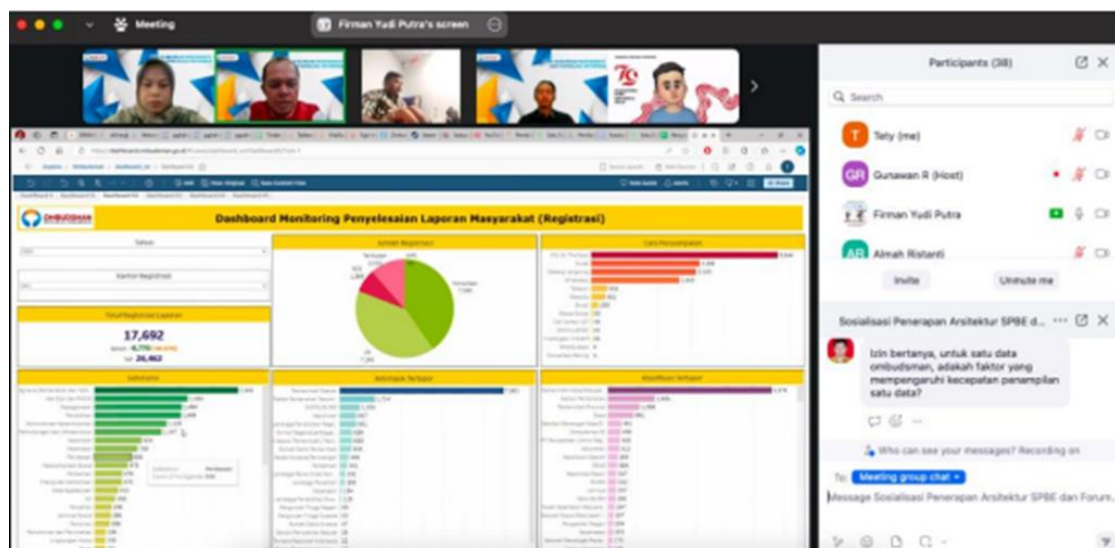
2.4.2. Kelompok Kerja/Layanan Data Informasi (Datin dan TI)

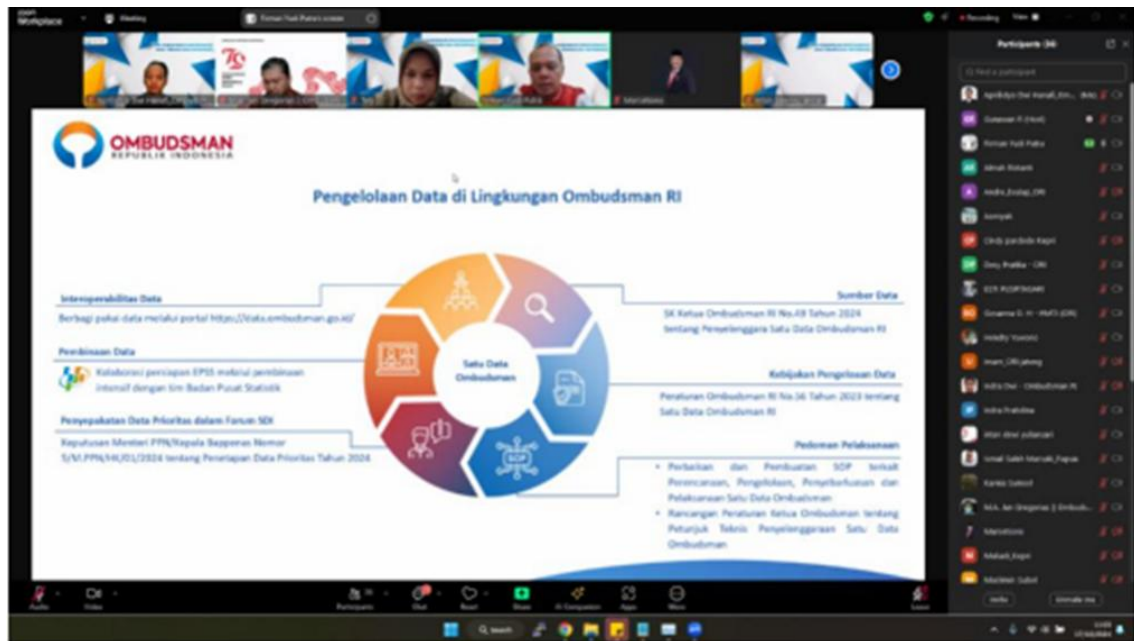
Pada Tahun 2024, Kelompok Kerja Data dan Informasi telah melakukan:

Penyelenggaraan Satu Data Ombudsman

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah demi mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (selanjutnya disebut Perpres 39/2019 tentang SDI) dan diharapkan dapat memperbaiki tata kelola data yang menguatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Transformasi Digital, serta Pembangunan Nasional secara umum.

Untuk memastikan terpenuhinya data-data yang berkualitas, Ombudsman RI telah menetapkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 56 Tahun 2023 tentang Satu Data Ombudsman RI, sesuai dengan amanat Presiden pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pada tahun 2024 telah diadakan forum Satu Data Ombudsman. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan proses pengelolaan data di lingkungan Ombudsman RI, penyepakatan Daftar Data Satu Data Ombudsman, pengembangan Dashboard Data Ombudsman. Adapun penggunaan Sistem Data dan Informasi (Sisdatin) selama Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:





Selain itu, pada tahun 2024 juga telah disahkan Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Ombudsman telah disahkan oleh Ketua Ombudsman RI. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola data yang baik di lingkungan Ombudsman RI sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Ombudsman juga berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satu Data Indonesia, salah satunya adalah Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Ombudsman RI juga berkontribusi aktif dalam ketersediaan data, dengan membuat Daftar Data dan Daftar Data Prioritas Ombudsman dan melakukan penyepakatan Data Prioritas Nasional.

Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas maka perlu dilakukan pengukuran melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS). Pelaksanaan EPSS menjadi salah satu bagian dari kegiatan utama Reformasi Birokrasi General pada sasaran Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kelompok Kerja Data dan Informasi melaksanakan pembinaan EPSS dengan tim Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 6 kali secara

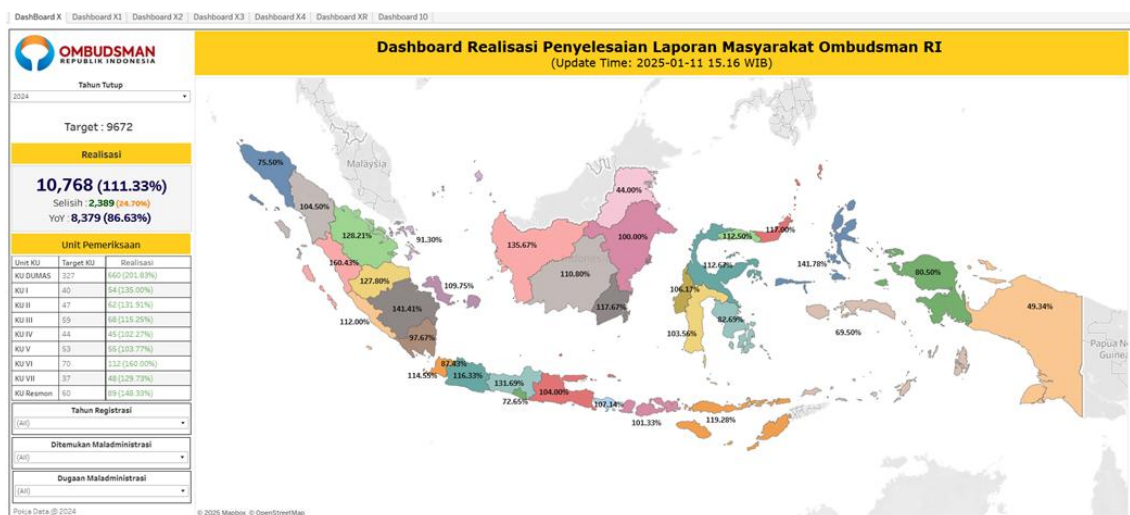
daring. Pembinaan ini bertujuan untuk mempersiapkan bukti-bukti dukung dalam Penilaian EPSS tahun 2024.

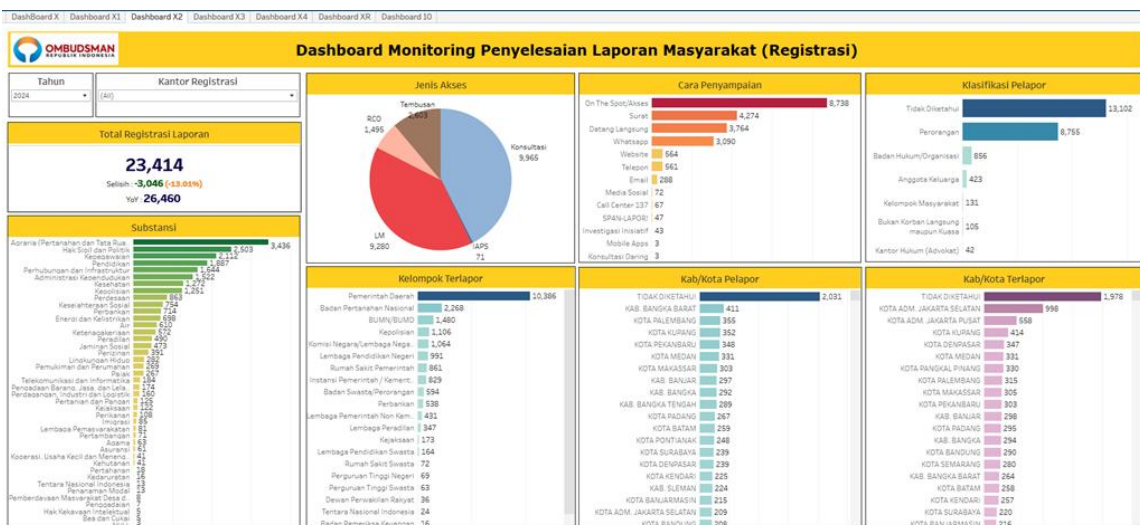
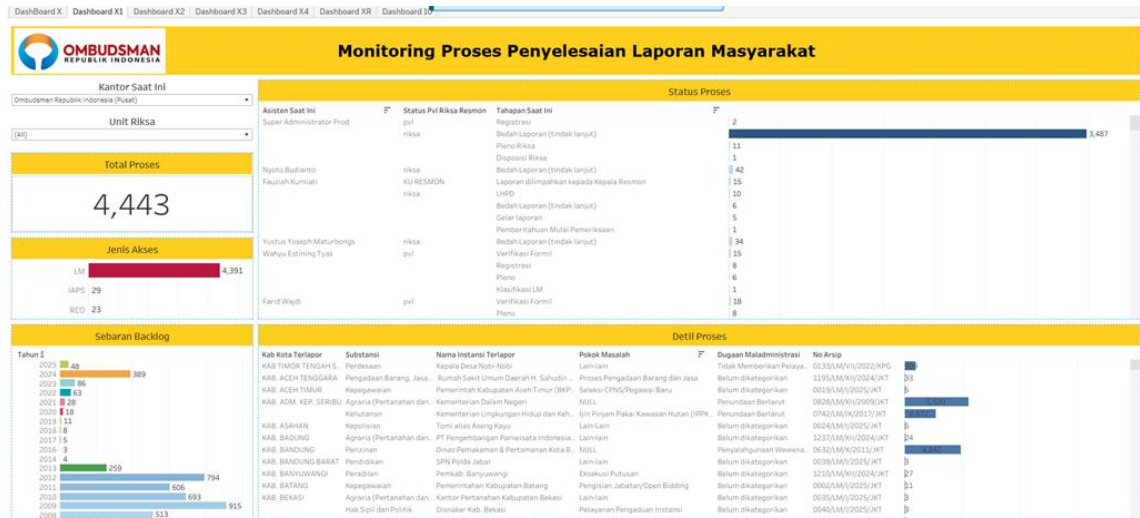
Berdasarkan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-378/01000/ES/2024 terkait Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS), nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Ombudsman RI tahun 2024 adalah 2,26 dengan predikat "Cukup". Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh BPS, diantaranya:

- Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI
- Walidata Menyusun prosedur baku terkait indikator pengumpulan dan perencanaan data, penjaminan kualitas data
- Melakukan pemenuhan kompetensi SDM yang dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan pengelolaan data yang baik
- Ombudsman RI melakukan kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik
- Ombudsman RI agar memanfaatkan Big Data untuk menghasilkan data statistik pendukung.

Memenuhi Permintaan Data dan Perbaikan Data pada Aplikasi SIMPEL4

Pada tahun 2024 Kelompok Kerja Data dan Informasi telah memperbaiki data sebanyak 6,425 data dan memenuhi sebanyak 109 permintaan data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan akurasi data. Selain itu, untuk meningkatkan penyebaran data dan pengambilan keputusan berdasarkan data, Kelompok Kerja Data dan Informasi telah melakukan proses pengadaan lisensi visualisasi data sehingga saat ini Ombudsman RI telah memiliki 2 lisensi creator dan 22 lisensi viewers aplikasi Tableau. Sosialisasi pengembangan dashboard Data Ombudsman telah dilakukan kepada para stakeholder, Kantor Perwakilan dan pada Forum Satu Data Ombudsman.





Proses Pengembangan Dashboard Data Ombudsman

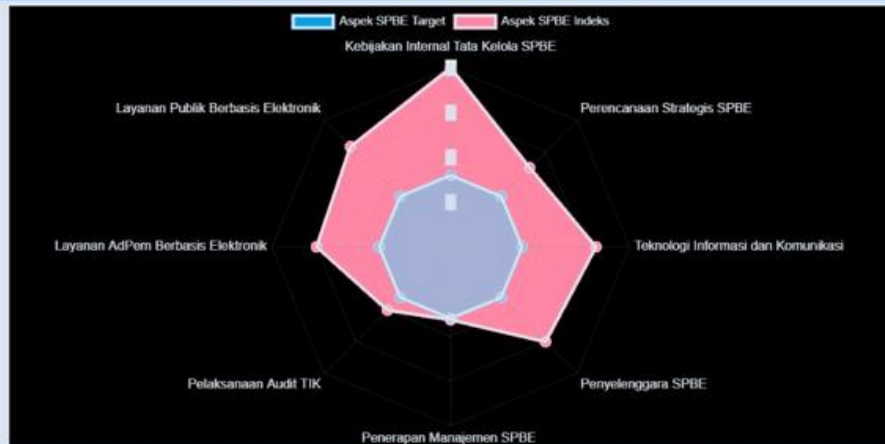
a. Pemantauan dan Evaluasi Indeks SPBE 2024

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas layanan digital. Penilaian dilakukan menggunakan model tingkat kematangan SPBE yang terdiri dari lima tingkatan, dengan metode evaluasi berupa penilaian mandiri, penilaian dokumen, wawancara, serta visitasi pada lokasi tertentu.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Ombudsman memperoleh Indeks SPBE sebesar **3,93**, yang dikategorikan sebagai **Sangat**

Baik. Domain dengan skor tertinggi adalah Kebijakan SPBE dan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dengan nilai 5,00, sementara domain dengan skor terendah adalah Manajemen SPBE dengan nilai 2,73 serta Penerapan Manajemen SPBE yang hanya mencapai 2,63. Secara umum, kekuatan utama dalam penerapan SPBE di Sekretariat Jenderal Ombudsman terletak pada pemenuhan semua indikator kebijakan tata kelola dan perencanaan strategis. Selain itu, layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik juga memiliki skor tinggi, yaitu 4,07.

Namun, terdapat beberapa kelemahan yang masih perlu diperbaiki, di antaranya pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, dan jaringan intra instansi yang belum optimal. Selain itu, aspek Audit TIK juga masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung penerapan SPBE yang lebih efektif. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari evaluasi ini adalah mempertahankan keunggulan dalam kebijakan internal dan layanan digital, meningkatkan kualitas Audit TIK, serta mengoptimalkan sistem dan jaringan agar mendukung integrasi layanan digital pemerintahan secara lebih baik. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Sekretariat Jenderal Ombudsman dalam meningkatkan penerapan SPBE secara lebih terintegrasi dan efisien di masa mendatang

INDEKS SPBE – SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN**3,93**
(Sangat Baik)**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,93
Domain Kebijakan SPBE	5,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,90
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	4,00
Domain Manajemen SPBE	2,73
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,63
<i>Audit TIK</i>	3,00
Domain Layanan SPBE	4,07
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,00
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,17

Hasil Penilaian Indeks SPBE 2024

Pengelolaan Ombudsman-CSIRT

Ombudsman Republik Indonesia telah membentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (Computer Security Incident Response Team atau CSIRT) sebagai langkah proaktif dalam menangani insiden keamanan siber di lingkungan institusi. Beberapa kegiatan dan layanan yang dilaksanakan oleh Ombudsman-CSIRT sepanjang tahun 2024 antara lain:

- Melakukan pemantauan / monitoring untuk mendeteksi potensi ancaman siber secara real-time. Monitoring sistem yang dibangun meliputi tools yang diadopsi secara swakelola seperti zabbix, mikrotik dan firewall dashboard, maupun tools yang difasilitasi oleh pihak ketiga seperti mail gateway proxmox, Attack Surface Management dan Endpoint Detection Response dari Kominfo. Layanan monitoring ini dilakukan pada jam kerja di ruang Ombudsman-CSIRT.
- Melakukan respons insiden baik pemblokiran serangan hacker maupun tindak lanjut laporan dari masyarakat terhadap kelemahan sistem yang dimiliki Ombudsman
- Kolaborasi dengan BSSN untuk ITSA (IT Security Assesment) aplikasi Humanusia
- Kolaborasi dengan Deputi VI BIN dalam monitoring ancaman siber dan kebocoran data

Selain itu Ombudsman-CSIRT juga dinilai oleh BSSN dalam kegiatan penilaian tingkat kematangan Cyber Security Maturity (CSM) dan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI). CSM merupakan instrumen yang dikembangkan oleh BSSN untuk menilai tingkat kematangan keamanan siber suatu organisasi, mengidentifikasi gap antara kondisi pengelolaan keamanan siber saat ini dengan kondisi ideal. Dalam penilaian CSM Tahun 2024, Ombudsman-CSIRT berhasil meraih capaian **"Implementasi Terkelola"**, dimana pengelolaan keamanan siber dipandang telah terorganisir, dilakukan revaluasi berkala dan berkelanjutan.

Hasil pengukuran indeks maturitas penanganan insiden keamanan siber (TMPI) di Ombudsman RI pada tahun 2024 adalah 1.79 atau berada pada tingkat 2. Hal tersebut digambarkan oleh BSSN bahwa Ombudsman sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan manajemen insiden, akan tetapi belum efektif/konsisten diterapkan. Selain itu apabila sudah terjadi insiden, sudah ada proses yang diupayakan berjalan akan tetapi penyelesaiannya tidak selalu efektif, memerlukan waktu dan berakibat gangguan pada layanan/operasional.

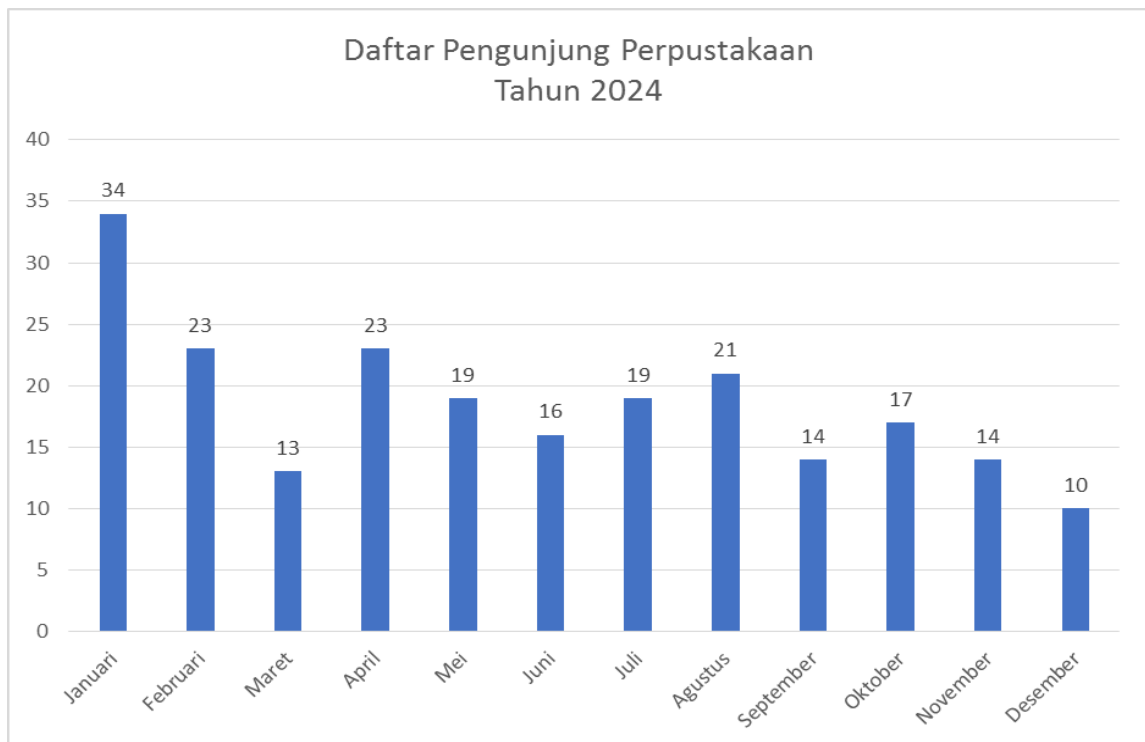


2.4.3. Kelompok Kerja/Layanan Kepustakaan

1) Pengelolaan Perpustakaan

a. Pelayanan Perpustakaan

Pada tahun 2024 jumlah pemustaka yang hadir dan memanfaatkan Perpustakaan dan Pojok Baca Digital (POCADI) adalah sebanyak 223 orang. Data dibawah ini belum menggambarkan jumlah pemustaka secara keseluruhan karena banyak pemustaka yang tidak menulis daftar hadir manual. Selain itu konsultasi dan permintaan koleksi terkait layanan perpustakaan juga dilaksanakan secara daring yaitu melalui WhatsApp. Dalam grafik dibawah, terlihat tren pengunjung menurun, hal ini disebabkan oleh liburan akhir tahun yang cukup panjang.



Gambar Grafik Pemustaka

b. Kegiatan Rutin

Pada tahun 2024, Perpustakaan Ombudsman melakukan beberapa kegiatan rutin terkait persebaran informasi dan promosi perpustakaan. Persebaran informasi dan promosi yang dilakukan berupa pembagian koran digital harian. Secara teknis koran digital akan disimpan pada Sisdatin dengan tautan yang berbeda setiap bulannya kemudian informasinya akan dibagikan

melalui grup WhatsApp dan Telegram. Namun pada triwulan ke-4 koran digital tidak lagi dibagikan melalui aplikasi Telegram, namun hanya dikirimkan kepada beberapa pemustaka dengan permintaan khusus. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan hak cipta karena file koran yang disebarakan berupa hasil pemindaian koran cetak.

No.	Bulan	Tautan Koran
1	Januari	https://bit.ly/KoranDigitalJAN24
2	Februari	https://bit.ly/KoranDigitalFEB24
3	Maret	https://bit.ly/KoranDigitalMAR24
4	April	https://bit.ly/KoranDigitalAPR24
5	Mei	https://bit.ly/KoranDigitalMEI24
6	Juni	https://bit.ly/KoranDigitalJUN24
7	Juli	https://bit.ly/KoranDigitalJUL24
8	Agustus	https://bit.ly/KoranDigitalAGU24
9	September	https://bit.ly/KoranDigitalSEP24
10	Oktober	https://bit.ly/KoranDigitalOKT23
11	November	https://bit.ly/KoranDigitalNOV23
12	Desember	https://bit.ly/KoranDigitalDES23

Tabel Daftar Tautan Koran Digital

Seni Mengelola Rindu
Claudia Sabina

Resensi Koleksi Buku

Mengelola Rindu

Rindu tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Rindu adalah sebuah perasaan yang menggigitkan sesuatu atau seseorang untuk bertemu. Ketika kita berada di suatu tempat yang tidak semuanya itu untuk bertemu, maka kita perlu mengelola rasa rindu. Kita tetap berpikir positif dengan jujur kepada diri sendiri, berfikir sabar dan memulihkan emosi. Kemudian tidak mengeluh waktu dan tempat sehingga Anda perlu mengelolanya dengan tepat.

Rindu ternyata memiliki daya magis sehingga siapa pun yang mengelolanya akan selalu mengingat sesuatu.

Claudia Sabina telah menghasilkan beberapa buku dan salah satunya adalah "Seni Mengelola Rindu". Dengan penulisannya yang mudah dimengerti Claudia tidak hanya memberikan pemahaman tentang apa itu rindu, namun juga memberikan saran bagi pembaca tentang bagaimana mengelola rindu dengan baik, sehingga apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa rindu hingga tidak berakumulasi.

Buku ini tersedia di Perpustakaan Ombudsman RI.

Bagaimana Mengendalikan Rasa Ingin Bertemu

www.perpustakaan.ombudsman.go.id

Ignite Millennial Leadership

6 Langkah untuk Memaksimalkan Potensi Pemimpin Generasi Berikutnya

Buku ini ditulis oleh Andrew Senduk dan terbit pada 2018

01 Inspiration

Menginspirasi adalah salah satu prinsip utama yang harus dikuasai semua pemimpin. Para pemimpin inspiratif mampu menyatukan semangat anggota tim dan dapat menggairahkan mereka untuk berprestasi.

02 Growth

Pola pikir berkembang adalah kunci dan pola pikiran yang tepat adalah alat utama untuk mencapai kesuksesan di bidang yang diteliti.

03 Nurture

Memiliki kemampuan berpikir yang baik adalah awal dari semua kesuksesan.

04 Influence

Keperlingan diukur melalui pengaruh, dan level kesuksesan yang Anda pegang diukur melalui apa yang Anda lakukan dengan pengaruh yang Anda miliki.

05 Trust

Membangun rasa percaya adalah inti dari kesuksesan. Terdapat 4 cara untuk membangun rasa percaya dalam suatu organisasi yaitu: kerangka, apa adanya, menyatakan pendapat, dan membangun hubungan.

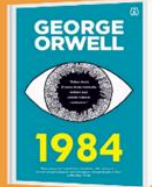
06 Excellence

Memiliki dan melatih kebiasaan baik merupakan salah satu kunci dalam meraih keunggulan.

perpustakaan.ombudsman.go.id

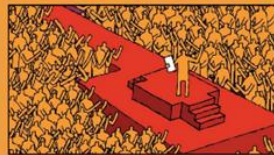
"BIG BROTHER SEDANG MENGAWASIMU."

Sepanjang hidupnya, Winston berusaha menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi setiap aturan Partai meski jauh di dalam hati dan pikirannya bersemayam antipati terhadap kediktatoran yang ada di negaranya. Walaupun begitu, Winston tidak berani melakukan perlawanan secara terbuka.



1984 adalah novel distopia klasik yang ditulis oleh George Orwell sebagai bentuk penolakan dirinya terhadap totalitarisme. Genre distopia ini menawarkan cerita tentang masa depan dengan gambaran kehidupan yang mengerikan.

Kengerian yang diciptakan oleh Orwell dalam 1984 menarik perhatian besar pembaca. Novel yang rampung ditulis pada tahun 1948 dengan setting 1984 ini seolah adalah ramalan yang Orwell tulis yang benar-benar terjadi di masa depan. Novel klasik ini hadir dengan berani mengangkat isu politik yang barangkali pada saat Orwell menulis ini belum terjadi dan benar-benar terjadi pada kondisi politik dunia saat ini, karena kebenarannya sudah mulai terlihat.



RESENSI KOLEKSI BUKU

GUY DE MAUPASSANT

JUMAT

5 OKTOBER

2024



KUMPULAN CERPEN

Karya dan visi Maupassant terbentuk dari pemikiran yang padat dan jelas serta merupakan perpaduan dan penyediannya dalam memahami ingatan fenomenal pada kejadian-kejadian yang lain biasa.

Maupassant mengulas topik pada karya dengan kesederhanaan, kejelasan dan objektif. Beliau juga menggunakan realisme psikologi hingga Perancis yang masih tradisional dalam menggambarkan karakter dalam karyanya.

TEMUKAN LEBIH DARI 40 CERPEN MENARIK DALAM BUKU INI

Guy de Maupassant (5 Agustus 1859-6 Juli 1893) adalah seorang penulis Perancis populer abad ke-19 dan dianggap sebagai salah satu penulis cerita pendek modern. Dikenal sebagai "a lion in the path" oleh Henry James seorang sastrawan dari Amerika dan "a genius" oleh Leo Tolstoy seorang sastrawan dari Rusia.

Karyanya banyak beredar belahang Perancis-Pemancis-Rusia tahun 1870-an dan beberapa diantaranya menceritakan kehidupan perang dan warga tak bernilai yang terpengaruh dalam konflik.



PERPUSTAKAAN.OMBUDSMAN.GO.ID

RESENSI NOVEL FIKSI

THE RING OF SOLOMON



Kisah petualangan jin yang luar biasa, Bartimaeus, pada masa kekuasaan Raja Solomon dengan cincin legendarisnya.

Jonathan Stroud hampir selalu berhasil menyampaikan komedi dan aksi yang ciamik dalam tokoh utama buku ini.

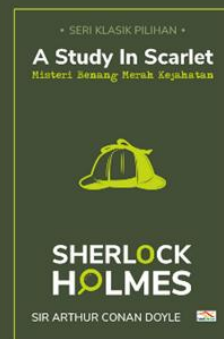
Cocok dibaca saat:

- Butuh hiburan
- Bosan
- Tertarik dengan cerita fantasi dunia lain

PERPUSTAKAAN.OMBUDSMAN.GO.ID

PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN

Siapkah Anda untuk mengetahui petualangan pertama Sherlock Holmes dan Dr. Watson?



Tersedia di Perpustakaan Ombudsman RI

perpustakaan.ombudsman.go.id



Daftar Buku yang diresensi

Sebagai upaya dalam melakukan promosi perpustakaan, Perpustakaan Ombudsman juga melakukan kegiatan rutin lainnya berupa resensi buku dan Newsletter dari Ombudsman internasional yang dibagikan via email.

Peluncuran Buku Ombudsprudensi

Perpustakaan Ombudsman RI bersama dengan Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring menggarap peluncuran Buku Ombudsprudensi. Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan serangkaian acara ulang tahun Ombudsman RI tepatnya pada tanggal 5 Maret 2024. Peluncuran Ombudsprudensi diselenggarakan secara *hybrid* bertempat di Kantor Pusat Ombudsman RI Lantai 1, Ruang Aula Serba Guna dan melalui aplikasi *zoom meeting* serta dapat disaksikan melalui *Live Youtube*, pukul 10.00-13.00 WIB. Acara ini dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu Bapak Budi Santoso (Anggota Ombudsman RI periode 2011-2016), Ibu Ninik Rahayu (Ketua Dewan Pers, Anggota Ombudsman RI periode 2016-2021), Bapak Adin Bondar (Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI), Ibu Ratna Sari Dewi (Kepala Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring Ombudsman RI), serta Bapak Asep Cahyana (Asisten Ombudsman RI) yang bertindak selaku moderator.

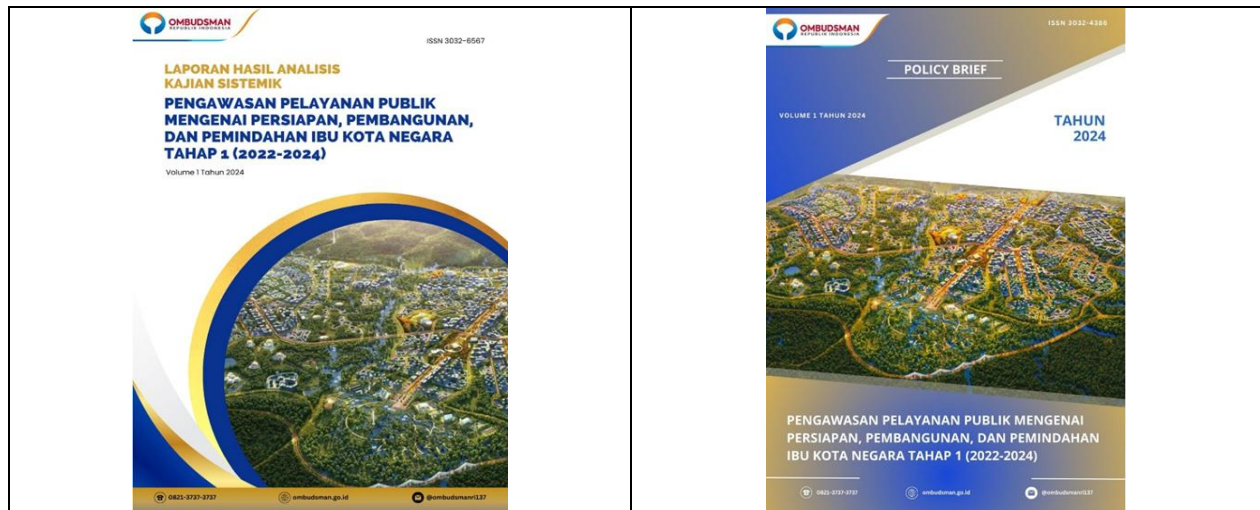


ISSN

Pada tahun 2024, Ombudsman RI melakukan pendaftaran ISSN untuk 3 judul karya terbitan berkala yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul Laporan Kajian Sistemik Pelayanan Publik: Pengawasan Pelayanan Publik terhadap Penerapan Kebijakan Pengakapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota dan Zona”, “Policy Brief Pengawasan Pelayanan Publik: Pengawasan Pelayanan Publik terhadap Penerapan Kebijakan Pengakapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota dan Zona”, dan Prosiding Pengawasan Pelayanan Publik: Bimbingan Teknis Keasistenan Utama V”. karya terbitan berkala tersebut didaftarkan ke BRIN sebagai pengelola ISSN di Indonesia. Dengan terdaftarnya karya terbitan Ombudsman di BRIN diharapkan dapat menjadi bahan refrensi dalam pengawasan pelayanan publik.

Terbitan berkala ini juga terus diperbarui dengan diterbitkannya Laporan Kajian Sistemik Pengawasan Pelayanan Publik dan Policy Brief Pengawasan Pelayanan Publik. Laporan Kajian Sistemik Pengawasan Pelayanan Publik merupakan kompilasi dari hasil observasi lapangan, diskusi, dan focus group discussion yang telah dilakukan oleh Tim Ombudsman RI di beberapa lokasi antara lain Ibu Kota Nusantara (IKN), Daerah Penyangga sekitar IKN, Kementerian/Lembaga, Kedutaan Besar dan Para Ahli di bidangnya. Adapun Policy Brief Pengawasan Pelayanan Publik memuat Saran Perbaikan dari Ombudsman mengenai persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara tahap 1 (2022-2024) kepada Kementerian/Lembaga/Instansi di tingkat pusat maupun daerah mengenai perbaikan di berbagai aspek seperti Regulasi, Infrastruktur dan Lingkungan, Pemindahan lingkungan dan posisi ASN, dan pembangunan social.





ISBN

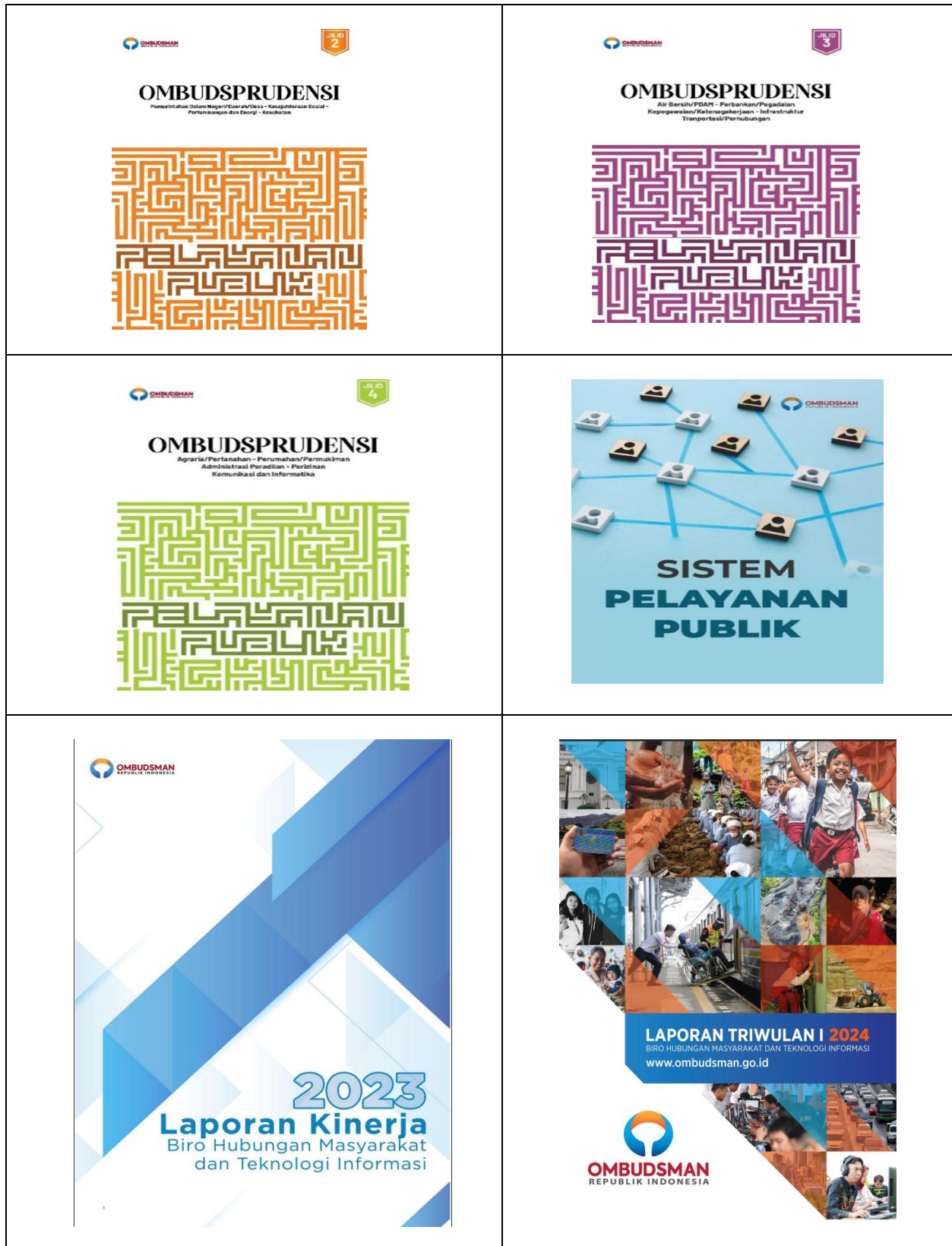
Pada tahun 2024, Ombudsman RI menerbitkan beberapa buku yang menggunakan penomoran ISBN. Beberapa buku tersebut berjudul "Pengawasan Pelayanan Publik: Wawasan Kebangsaan, Demokrasi dan Pembangunan (Perspektif Insan Ombudsman RI)" dan buku berjudul "Ombudsprudensi" yang terdiri dari 4 jilid dan Sistem Pelayanan Publik yang memuat Kumpulan tulisan dari Insan Ombudsman di Perwakilan Kalimantan Selatan.

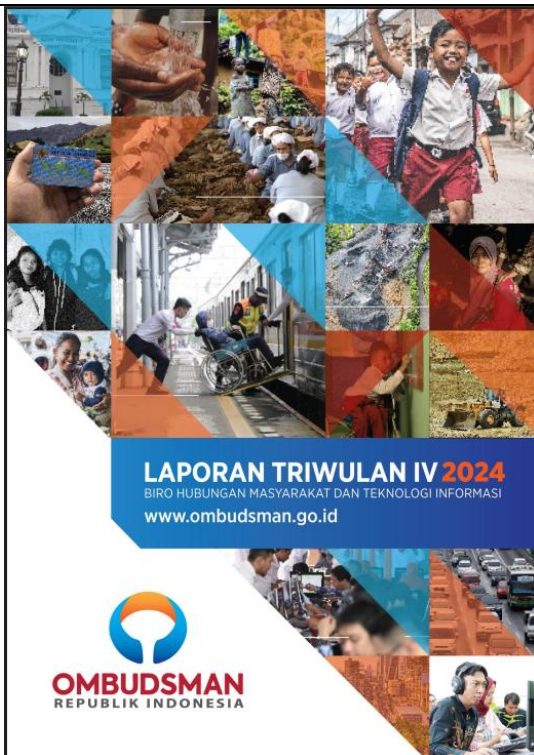
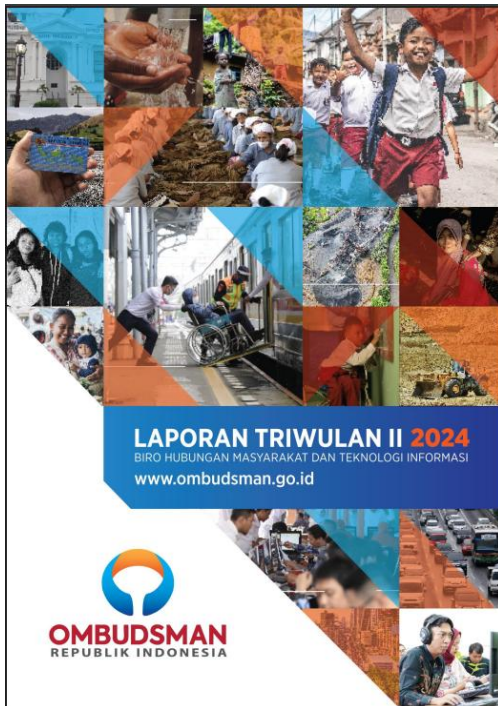
ISBN buku Pengawasan Pelayanan Publik



ISBN Buku Ombudsprudensi jilid 1





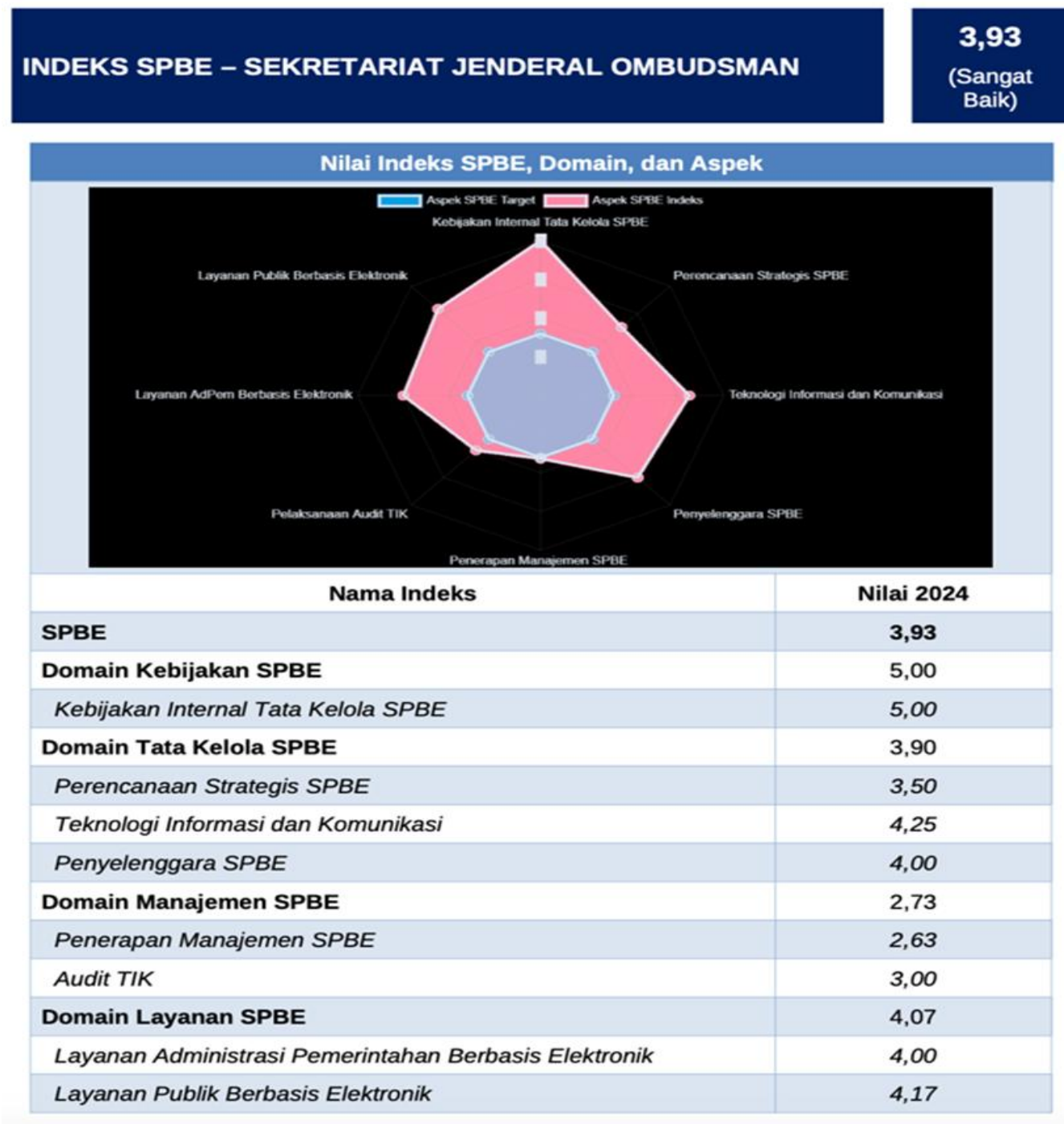


Seluruh Laporan Biro HMTI sepanjang Tahun 2024

PENGHARGAAN

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada tahun 2024 mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya:

1. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2024 Predikat “SANGAT BAIK” (3,93)



2. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024
Predikat **"Informatif" (95,43)**



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 52 /KEP/KIP/XII/2024

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 52 /KEP/KIP/XII/2024
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2024

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2024**

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN PENGAWAS PEMILU	98,43
2.	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	97,40
3.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	97,38
4.	KOMISI PEMILIHAN UMUM	97,00
5.	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	95,43
6.	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	95,00
7.	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	94,90

3. Pelaksanaan laksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan untuk melakukan evaluasi Layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sepanjang Tahun 2024: <https://bit.ly/SurveiLayananBiroHMTI2024>

4. Tindak Lanjut Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI (100%)

No	Unit Kerja	Temuan BPK atas LK 2016 s.d 2021			Temuan BPK atas LK 2016 s.d 2021			Capaian
		Jumlah Orang	Telah Selesai Di TL	Belum Di TL / Belum Lunas	Jumlah Temuan	Telah Selesai Di TL	Belum Di TL / Belum Lunas	
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	21	21	-	30.532.136	30.532.136	-	100,00%
2	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	16	16	-	23.354.723	23.354.723	-	100,00%
3	Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi	11	11	-	7.384.242	7.384.242	-	100,00%
4	Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	12	12	-	8.544.113	8.544.113	-	100,00%
5	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	24	24	-	22.187.529	22.187.529	-	100,00%
6	Inspektorat	10	10	-	4.861.111	4.861.111	-	100,00%

5. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Biro HMTI Tahun 2024



6. Nilai Validitas Mutu Unit Kerja dan Tindak Lanjut Rekomendasi KUMM Tahun 2024 Biro HMTI, berdasarkan Nota Dinas Kepala Keasistenan Utama Manajemen Mutu Nomor: 21/PR.07.01/I/2025, tanggal 13 Januari 2025

Unit Kerja/ Keasistenan Utama/Perwakilan	Jumlah Rekomendasi KUMM atas Hasil Pemeriksaan Aduan WBS yang harus dilaksanakan	Jumlah Rekomendasi KUMM atas Hasil Pemeriksaan Aduan WBS yang dilaksanakan	Jumlah Rekomendasi KUMM atas Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan yang Harus Dilaksanakan di:		Jumlah Rekomendasi KUMM atas Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan yang Dilaksanakan di Tahun 2024	Jumlah Rekomendasi KUMM atas Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi yang Harus Dilaksanakan di:		Jumlah Rekomendasi KUMM atas Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi yang dilaksanakan di Tahun 2024	Total Rekomendasi (Aduan & Jamut) KUMM Tahun 2024 yang Harus Dilaksanakan	Total Rekomendasi (Aduan & Jamut) KUMM Tahun 2024 yang Dilaksanakan	Persentase Rekomenda- (Aduan & Jamut) KUM Tahun 2024 yang Dilaksanakan
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2024	Tahun 2025				
Biro HMTI	0	0	3	0	2	0	0	0	3	2	66.67%

7. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS bagi Insan Ombudsman Republik Indonesia melalui Coaching dan Mentoring Tahun 2024 Biro HMTI



BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI

SURAT TUGAS

NOMOR: 1166/KP.04.15-SJ/XII/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil bagi Insan Ombudsman Republik Indonesia melalui *Coaching* dan *Mentoring* Tahun 2024; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman Republik Indonesia.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

MEMBERIKAN TUGAS:

Kepada : Seluruh ASN di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kantor Pusat dan Perwakilan;

- Untuk : 1. Wajib melaksanakan kegiatan *Coaching* dan *Mentoring* Tahun 2024 di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 18 s.d 24 Desember 2024 secara *hybrid* dengan jadwal sebagaimana terlampir;
2. Panduan, Materi serta Kartu Kendali *Coaching* dan *Mentoring* dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/CMCBIROSDMU2023>;
3. Setelah pelaksanaan *Coaching* dan *Mentoring*, seluruh pegawai diwajibkan untuk mengirimkan Kartu Kendali hasil *Coaching* dan *Mentoring* pada email gosanna.harianja@ombudsman.go.id.

- 3 -

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 1166/KP.04.15-SJ/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

**JADWAL COACHING DAN MENTORING
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

No	Nama	Pusat/ Perwakilan	Tanggal	Waktu (WIB)	Media
1.	Heru Tjahjono	Pusat	18 Des 2024	09.00-10.00	Tatap Muka
2.	Maruli Anjaya Junior Gregorius	Pusat	18 Des 2024	10.00-11.00	Tatap Muka
3.	Maharandy Fadian Monoarfa	Pusat	18 Des 2024	11.00-12.00	Tatap Muka
4.	Fuad Mushofa	Pusat	18 Des 2024	13.00-14.00	Tatap Muka
5.	Apriistyo Dwi Harafi	Pusat	18 Des 2024	14.00-15.00	Tatap Muka
6.	Firman Yudi Putra	Pusat	18 Des 2024	15.00-16.00	Tatap Muka
7.	Anita Widyaning Putri	Pusat	18 Des 2024	16.00-17.00	Tatap Muka
8.	Indra Dwi Aprianto	Pusat	19 Des 2024	09.00-10.00	Tatap Muka
9.	Stefanus Lugas Praslowo	Pusat	19 Des 2024	10.00-11.00	Tatap Muka
10.	Gosanna Oktavia Harianja	Pusat	18 Des 2024	08.00-09.00	Tatap Muka
11.	Rani Sabtelasari	Pusat	19 Des 2024	13.00-14.00	Tatap Muka
12.	Nurul Istiamuji	Pusat	19 Des 2024	14.00-15.00	Tatap Muka
13.	Gunawan Riyanto	Pusat	19 Des 2024	15.00-16.00	Tatap Muka
14.	Zenia Annabel	Pusat	20 Des 2024	08.00-09.00	Tatap Muka
15.	Yemina Dwi Kurnia Wati	Pusat	19 Des 2024	16.00-17.00	Tatap Muka
16.	Ganjar Yoga Supratama	Pusat	20 Des 2024	09.00-10.00	Tatap Muka
17.	Tety Yuniarti	Pusat	20 Des 2024	10.00-11.00	Tatap Muka
18.	Imanda Kartika Sari	Pusat	20 Des 2024	11.00-12.00	Tatap Muka
19.	Eko Wahyu Wijantoro	Pusat	20 Des 2024	14.00-15.00	Tatap Muka
20.	Bayu Victoria Warman	Pusat	20 Des 2024	15.00-16.00	Tatap Muka
21.	Muhammad Ridho	Pusat	20 Des 2024	16.00-17.00	Tatap Muka
22.	Muhamad Fatra	Pusat	23 Des 2024	16.00-17.00	Tatap Muka

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 16 Desember 2024

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi,



Dodi Wahyugi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

- 4 -

	Dasa Mura			
23.	Siti Fatimah	Pusat	24 Des 2024	08.00-09.00 Tatap Muka
24.	Nurwalid Akhri Hidayat	Pusat	24 Des 2024	09.00-10.00 Tatap Muka
25.	Fefa Bianca Belladina	Pusat	24 Des 2024	10.00-11.00 Tatap Muka
26.	Victor Riandani Iwisara	Pusat	24 Des 2024	11.00-12.00 Tatap Muka
27.	Yasin Jauhari	Pusat	19 Des 2024	08.00-09.00 Tatap Muka
28.	Hasti Aulia Nida	Pusat	23 Des 2024	15.00-16.00 Tatap Muka
29.	Intan Dewi Yuliansari	Perwakilan	23 Des 2024	08.00-09.00 Zoom Meeting
30.	Abdul Latif	Perwakilan	23 Des 2024	09.00-10.00 Zoom Meeting
31.	Reihana Ferdian	Perwakilan	23 Des 2024	10.00-11.00 Zoom Meeting
32.	Oktavun Rilien Prasmasari	Perwakilan	19 Des 2024	11.00-12.00 Zoom Meeting
33.	Arifan Arsyad	Perwakilan	23 Des 2024	11.00-12.00 Zoom Meeting
34.	Marisya Fadhila	Perwakilan	23 Des 2024	13.00-14.00 Zoom Meeting
35.	Tengku Reza Pahlepi	Perwakilan	23 Des 2024	14.00-15.00 Zoom Meeting

CATATAN:

- Coaching dan mentoring **WAJIB** dilaksanakan sebanyak 75% dari total pegawai
- Jadwal dapat menyesuaikan, harap konfirmasi terlebih dahulu dan mencari rekan pengganti (tukar jadwal), agar disesuaikan jadwal Kepala Biro
- Pastikan **KARTU KENDALI DAN JADWAL PROSES COACHING** sudah terisi dengan benar beserta bukti dokumentasi, sesuai: <https://bit.ly/CoachingMentoringForm>
- Untuk pegawai Kantor Pusat diharapkan untuk tatap muka/luring, jika berhalangan bisa dilakukan daring
- Khusus pegawai di Kantor Perwakilan menggunakan Zoom meeting
- Dimohon untuk dapat meluangkan waktu melaksanakan coaching dan mentoring, maksimal hingga tanggal 24 Desember 2024.

8. Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori **A (Memuaskan) Nilai 86,40**
Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasis secara

keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 78,63 (tujuh puluh delapan koma enam tiga) dengan kategori "BB (Sangat Baik).



Aspek/Sub Aspek		Nilai Standar	Nilai	Bobot Sub-Aspek	Nilai Sub-Aspek	Bobot Aspek	Nilai Aspek
(2)		(3)	(4)	(5)	$(6) = (4) / ((3) \times (5) \times 100)$	(7)	$(8) = (6) \times (7)$
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS		6200	4460		71,57	40%	28,63
1.1	Penciptaan Arsip	2700	2600	40%	38,52		
1.2	Penggunaan Arsip	700	610	20%	17,43		
1.3	Pemeliharaan Arsip	1600	1250	20%	15,63		
1.4	Penyusutan Arsip	1200	0	20%	0,00		
SUMBER DAYA KEARSIPAN		2400	2275		83,33	60%	50,00
2.1	SDM Kearsipan	300	175	40%	23,33		
2.2	Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	2100	60%	60,00		
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal							78,63
Kategori							BB (SANGAT BAIK)

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman Republik Indonesia atas pelaksanaan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja, dan dapat memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian capaian indikator, menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang ditetapkan masuk kategori berhasil memenuhi target.

Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah “Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas” dengan target nilai 2,95 (skala 4), direalisasikan senilai 3,56 dengan persentase sebesar 120,68%. Realisasi Perjanjian Kinerja atas nilai aspek implementasi dengan bobot 33,3% terhadap Capaian Rincian Output, Nilai Efisiensi Unit Kerja, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, dan Penyerapan Anggaran mendapatkan nilai 99,71%. Selain itu nilai aspek manfaat dengan bobot 66,7% terhadap variable indikator mendapatkan hasil nilai 85,92%.

Total penyerapan dari pagu Rp 3.859.103.000 direalisasikan Rp 3.200.018.002 (99,71%), dengan tercapainya semua target di tahun 2024 terdapat efisiensi sebesar Rp 649.928.000. Dokumen hasil kinerja capaian output selama tahun 2024: Nilai keterbukaan informasi publik, Indeks SPBE, Indeks kepuasan pengguna layanan Biro, Nilai SAKIP, Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku, Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai, Nilai pengelolaan arsip, Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui *coaching/mentoring/counseling* (CMC), dan Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah menyusun 6 dokumen Laporan Kinerja 2024, Laporan Triwulan I, II, III, dan IV 2024, Laporan Tahunan 2024 sesuai target perjanjian kinerja.

Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024

- Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman RI pada tahun 2024 sangat baik. Biro ini telah berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan, baik dalam hal realisasi anggaran maupun indikator kinerja.
- Capaian indeks kinerja mencapai 120,68%, yang menunjukkan bahwa kinerja biro sangat baik dan positif. Ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas.
- Realisasi anggaran mencapai 99,71%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat efisien. Ini berarti hampir seluruh anggaran yang dialokasikan telah digunakan sesuai dengan perencanaan.
- Semua rincian output yang telah ditetapkan telah mencapai target. Ini menunjukkan bahwa Biro HMTI telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.
- Secara keseluruhan, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman RI pada tahun 2024 sangat baik. Biro telah berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi. Dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan, diharapkan kinerja biro dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Organisasi dan eksternal, khususnya stakeholder Ombudsman RI.
- Seluruh Laporan Biro HMTI sepanjang tahun dapat diakses dalam tautan berikut:
<https://sisdatin.ombudsman.go.id:5600/sharing/9KLy99yVI>

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Biro, Rencana Kerja, dan Realisasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2024

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dodi Wahyugi
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
TEKNOLOGI INFORMASI,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309151993111001

Dodi Wahyugi
NIP. 198106222003121003



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	2,93	0,5	1,2	1,7	2,93
	Jumlah Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6	3	1	1	1

Jakarta, Januari 2024
 KEPALA BIRO
 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
 TEKNOLOGI INFORMASI,

Dodi Wahyugi
 NIP. 198106222003121003

Daftar Variabel Target Rincian Output Indikator Aspek Implementasi

KODE	URAIAN	TARGET	
		Volume	Satuan
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	212	Laporan
4192.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan

Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas Indeks Kinerja Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/ Tahunan	2,95 (Skala 4)	3,56 (Skala 4)	120,68 %
		6	6	100%



BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOTA DINAS

NOMOR: 167/PR.06/I/2024

Yth. : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
Hal : Penyampaian Data Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023
Tanggal : 18 Januari 2024

Menindaklanjuti nota dinas Sekretaris Jenderal nomor 42/PR.06/I/2024, tanggal 9 Januari 2024, hal Permintaan Data Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dapat kami sampaikan bahwa kami telah menyelesaikan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan data realisasi dan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, sebagai bahan tindak lanjut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Teknologi Informasi,



Dodi Wahyugi



JLN. H.R. RASUNA SAID KAV. C-19 KUNINGAN
JAKARTA SELATAN 12920
TELP. (021) 5296 0894-95, 5296 0904-05 FAX : (021)5296 0907-08

